PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Padang, Januari 2021

KATA PENGANTAR



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Bappeda dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Melanjutkan sasaran tahun sebelumnya, rencana kinerja tahun 2020 ini ditetapkan dalam pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Padang, Januari 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Hansastri,SE,Ak,MM,CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2020, (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.



Capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dalam mewujudkan tujuan "Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas" yang dijabarkan dalam 2 sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan target tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi dengan capaian 100%.

2) Capaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan pada sasaran strategis 1 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.041.767.359,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.847.429.065,- atau sebesar 97,24% untuk kinerja 3 program yaitu (1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Program Pembangunan Data dan Informasi Pembangunan, dan (3) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target tahun 2020 memperoleh nilai BB dan terealisasi dengan kategori BB (72,51).

4) Capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada sasaran strategis 2 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.133.868.522,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.075.184.164,80,- atau sebesar 98,58% untuk kinerja 5 program yaitu (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Disisplin Aparatur, (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dan (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

5) Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.175.635.881,- yang direalisasikan sebesar Rp. 10.922.613.229,80,- atau sebesar 97,74%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 253.022.651,20,-

(2,26%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
2. Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan.



Area Perbaikan yang sudah dilakukan

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas serta berjalannya reformasi birokrasi, sudah dilakukan beberapa area perbaikan antara lain :

1) Area Ketatalaksanaan
   1. Peta proses bisnis telah dijabarkan dalam bentuk SOP
   2. Prosedur operasional (SOP) telah diterapkan
   3. Informasi publik terkait kinerja Bappeda telah dapat diakses melalui website dan Facebook Bappeda

2) Area Manajemen Perubahan
   1. Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkup Bappeda Prov. Sumbar melalui SK Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor : 020/29/I/SK/Set/Bappeda-2020.
   2. Rencana Kerja telah selaras dengan Roadmap
   3. Rencana Kerja telah di monitoring dan di evaluasi melalui rapat evaluasi
   4. Telah dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bappeda Prov. Sumbar melalui SK Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor : 820/25/IV/Set/Bappeda-2020

3) Area Penataan dan Penguatan Organisasi
   1. Telah dilakukan review terhadap Anjab dan ABK Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.
   2. Telah disusun SOTK baru sesuai kebutuhan kinerja organisasi.
   3. Telah disusun konsep standar kompetensi teknis jabatan Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.
   4. Telah disusun database kebutuhan diklat kompetensi bagi pegawai di Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.

4) Area Sumber Daya Manusia
   1. SKP Tahun 2020 telah dibuat secara berjenjang dan selaras dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
   2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah dibuat dan telah dilakukan evaluasi.
   3. Telah disusun database kebutuhan diklat kompetensi bagi pegawai di Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.

5) Area Kuntabilitas
   1. Pimpinan sudah terlibat langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.
   2. Pimpinan sudah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
   3. Perjanjian Kinerja secara berjenjang dan selaras mulai dari Esselon II, III, IV dan Staf telah dibuat.

4. Indikator Kinerja Individu telah dibuat dan disesuaikan dengan PK dan SKP.
5. Rencana Aksi telah dibuat dan dievaluasi secara berkala.

6) Area Pengawasan
1. Telah dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Bappeda Prov. Sumbar dengan SK Kepala Bappeda Prov. Sumbar No. 821/32/I/Set/Bappeda-2020.
2. Telah dilakukan Public campaign melalui spanduk dan pamlet.
3. Telah dilakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dilingkungan Bappeda Prov. Sumbar.
4. Telah disusun Pedoman Penanganan Whistleblowing pada Bappeda Prov. Sumbar melalui SK Kepala Bappeda No. 020/30/I/SK/Set/Bappeda-2020.

7) Pelayanan Publik
1. Melakukan pengembangan Aplikasi Sakato Plan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.
2. Melakukan pengembangan Aplikasi SIMONEV DOKRENDA sebagai media dalam melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja.
3. Pengelolaan SDP2D Sistem Database Perencanaan.



Area Perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2021

1) Melakukan penyempurnaan terhadap indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui perbaikan cascading kinerja secara berjenjang sesuai dengan nomenklatur baru.

2) Menggunakan aplikasi e-kinerja dalam pengukuran capaian data kinerja secara berjenjang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Organisasi 1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi 1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.1.3 Struktur Organisasi 5
1.1.4 Cascading Kinerja 7
1.1.5 Sumber Daya Manusia 10
1.2 Aspek Organisasi 12
1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) 12
1.4 Sistematika Penyajian 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Rencana Strategis 15
2.1.1 Tujuan dan Sasaran 16
2.1.2 Strategi dan Kebijakan 18
2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2020 22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 25
3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja 26
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020 28
1. Sasaran Strategis 1 29
2. Sasaran Strategis 2 132
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2020 138

BAB IV PENUTUP 144
4.1 Kesimpulan 144
4.2 Rekomendasi 145

LAMPIRAN :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2020
3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.2	Strategi dan arah KebijakanJangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	19
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	26
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020	27
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan	28
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2020	29
Tabel 3.6	Kesesuaian Sasaran dan Indikator RPJMD dengan Renstra	30
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra	56
Tabel 3.8	Kesesuaian Sasaran dan Indikator Renstra dengan Renja	56
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra	85
Tabel 3.10	Kesesuaian Sasaran dan Indikator RPJMD dengan RKPD	85
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra	106
Tabel 3.12	Kesesuaian Sasaran dan Indikator RKPD dengan KUA PPAS	107
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra	129
Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2020	132
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Tahun 2020	139
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan Tahun 2020	140

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan pada Sub Indikator Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra Tahun 2016 s.d 2020	55
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan pada Sub Indikator Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara Renstra dengan Renja Tahun 2016 s.d 2020	84
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan pada Sub Indikator Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2016 s.d 2020	106
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan pada Sub Indikator Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS Tahun 2016 s.d 2020	129
Grafik 3.5	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Bappeda Prov. Sumatera Barat	6
Gambar 2	Cascading Kinerja	7
Gambar 3	Pohon Kinerja I	8
Gambar 4	Pohon Kinerja II	9

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri atas susunan organsasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Program; dan
   3. Sub bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
   1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
   2. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
   3. Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan.

d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
   1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
   2. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
   3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

e. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, membawahi :
   1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
   2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
   3. Sub Bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

f. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
   1. Sub Bidang Ekonomi;
   2. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur wilayah; dan
   3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dengan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;

c. pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;

f. pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah;

g. penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
2. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
3. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan makro, pendanaan pembangunan dan sistem inovasi perencanaan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan makro;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendanaan pembangunan; dan
3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.

c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Trantibbum Linmas, Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan pengembangan, Komunikasi, Persandian, statistik, Fungsi penunjang dan Fungsi Lainnya, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
2. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur; dan
3. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

d. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta data informasi informasi perencanaan pembangunan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

e. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, kebencanaan, Pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
2. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
3. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, tata ruang dan lingkungan hidup.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Jabatan Fungsional Perencana yang bertugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
2. Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
3. Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana

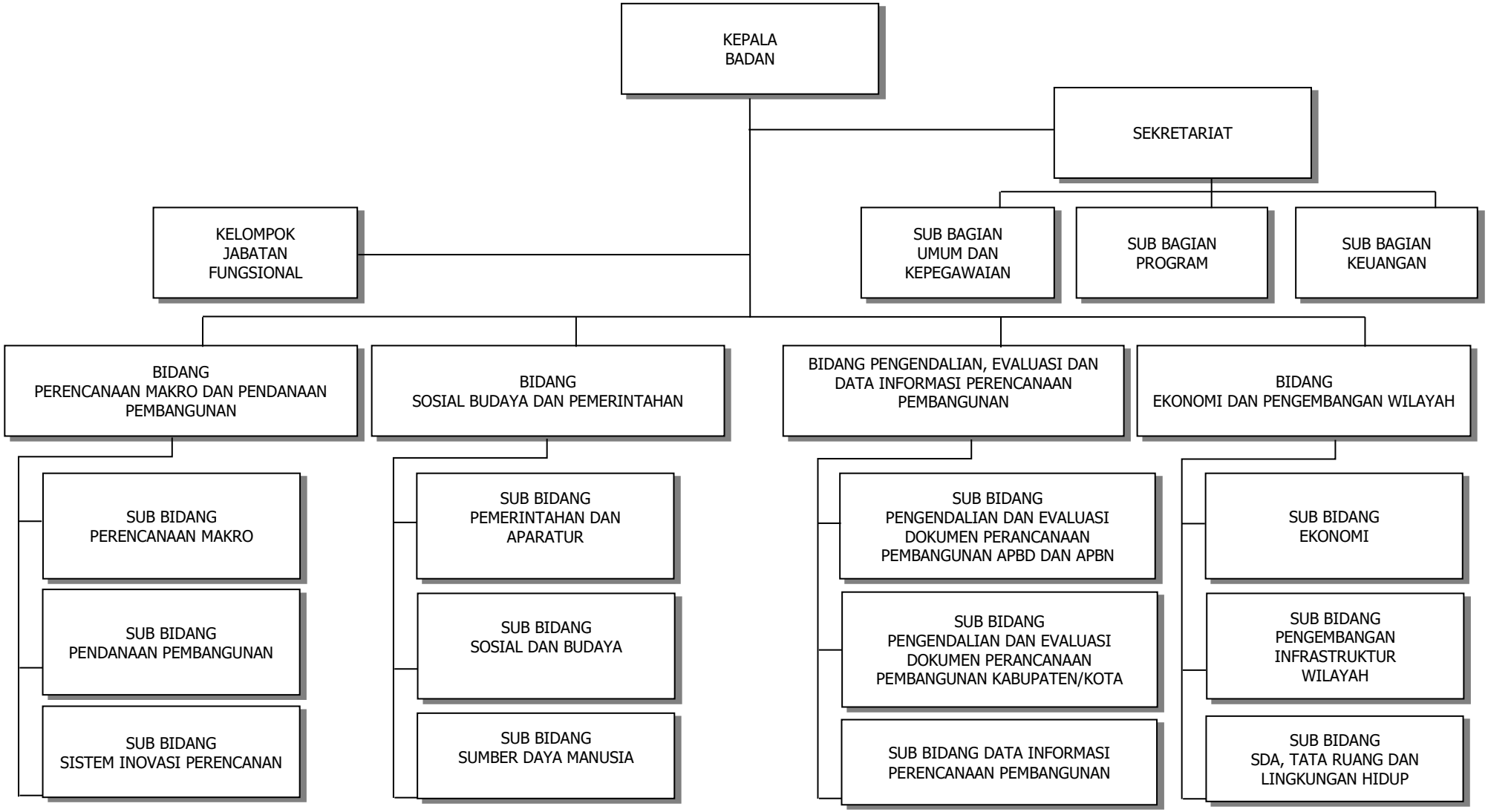
1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- Jabatan Kepala Badan, Eselon II a
- 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a
- 4 Jabatan Fungsional Perencana
- 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV a

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

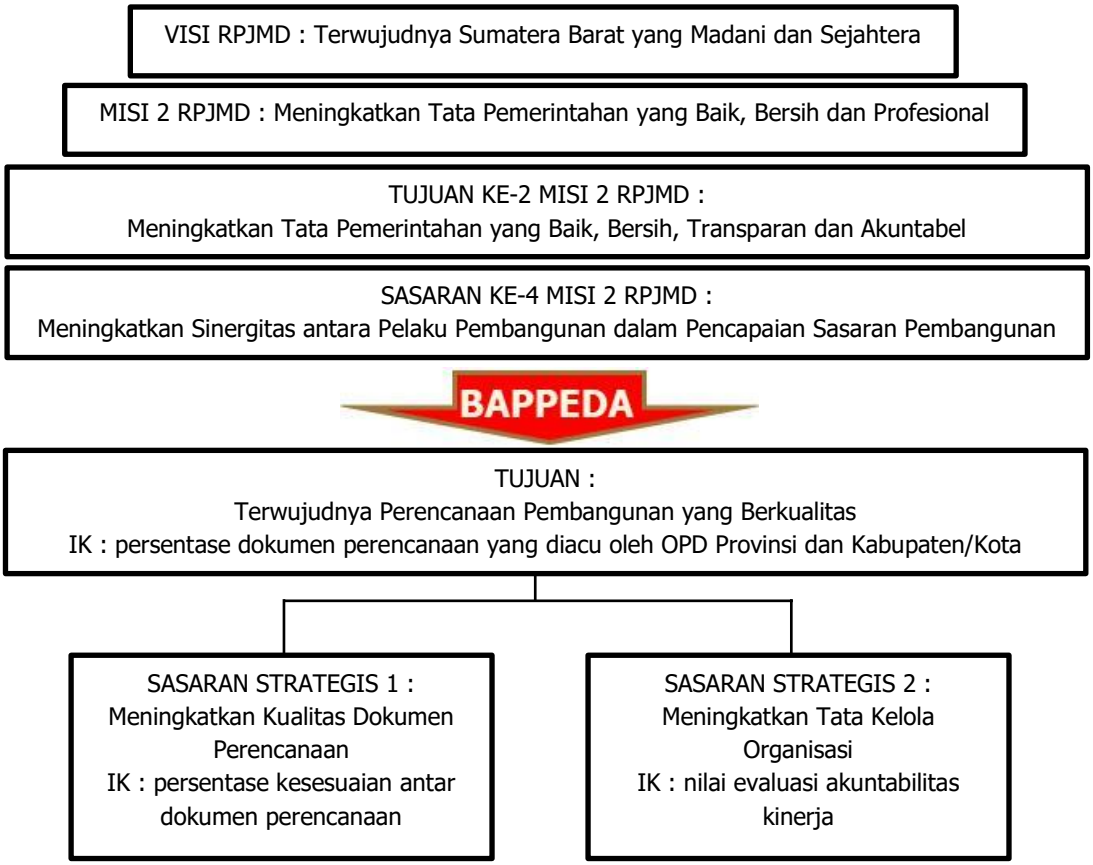
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat



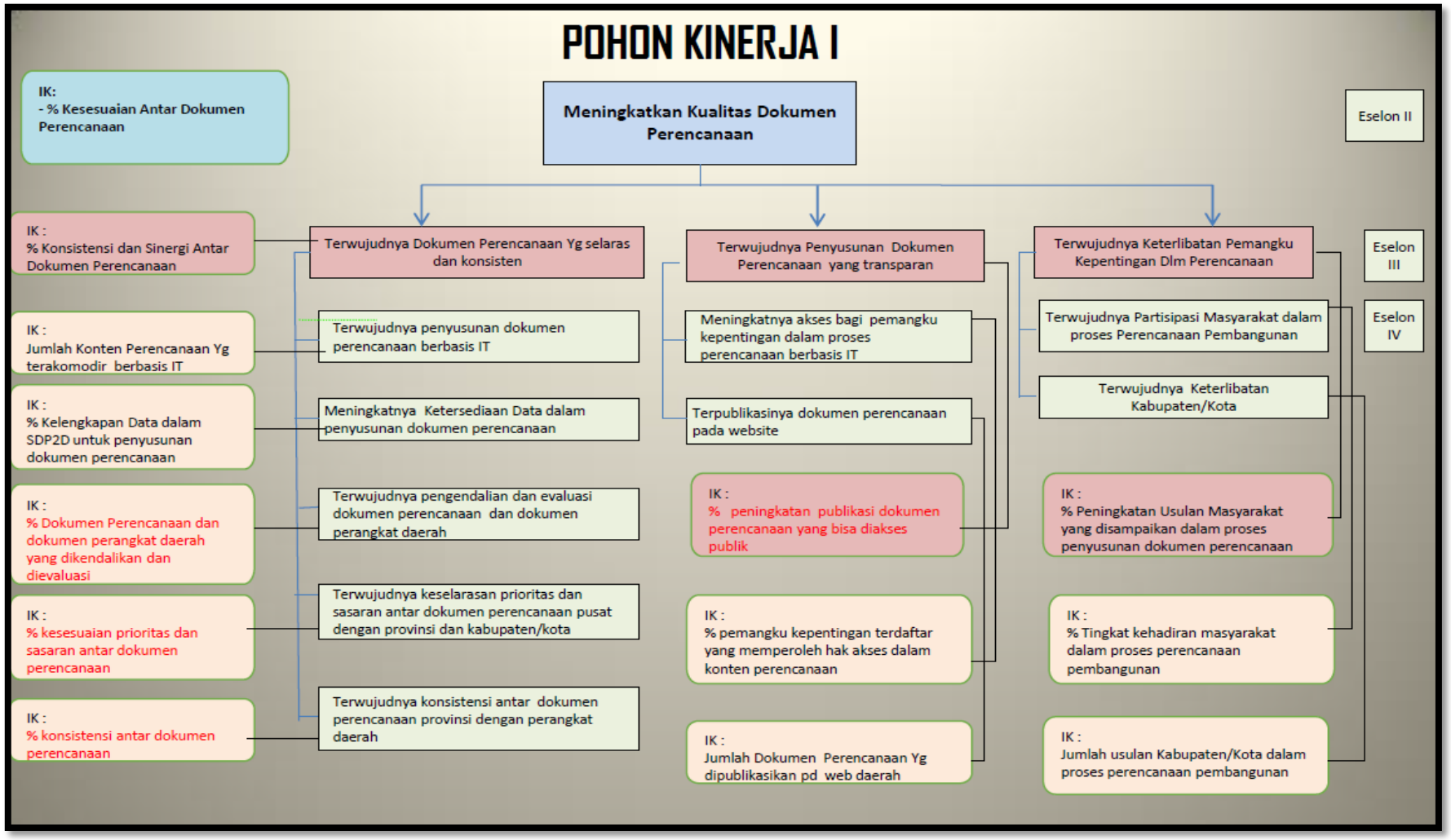
1.1.4 Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut :

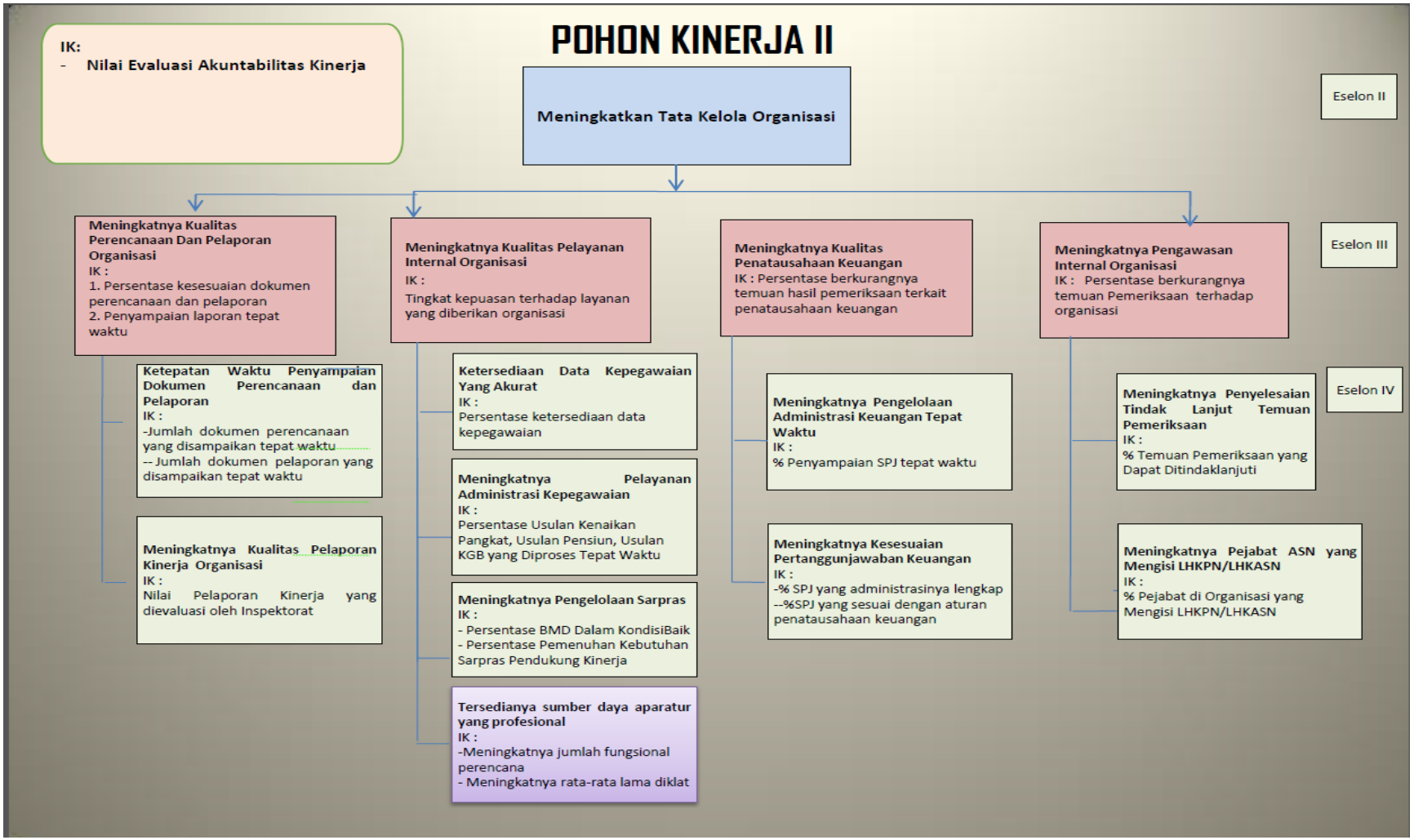
Gambar 2. Cascading Kinerja



Gambar 3. Pohon Kinerja I



Gambar 4. Pohon Kinerja II



1.1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2020, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 89 orang yang terdiri atas 19 orang struktural, 62 orang fungsional umum dan 4 orang Fungsional Tertentu, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Esselon II	1	-	1
2.	Esselon III	2	2	4
3.	Esselon IV	8	6	14
4.	Fungsional Tertentu	1	3	4
5.	Fungsional Umum	36	26	62
6.	PTT	1	-	1
	Jumlah	**49**	**37**	**86**

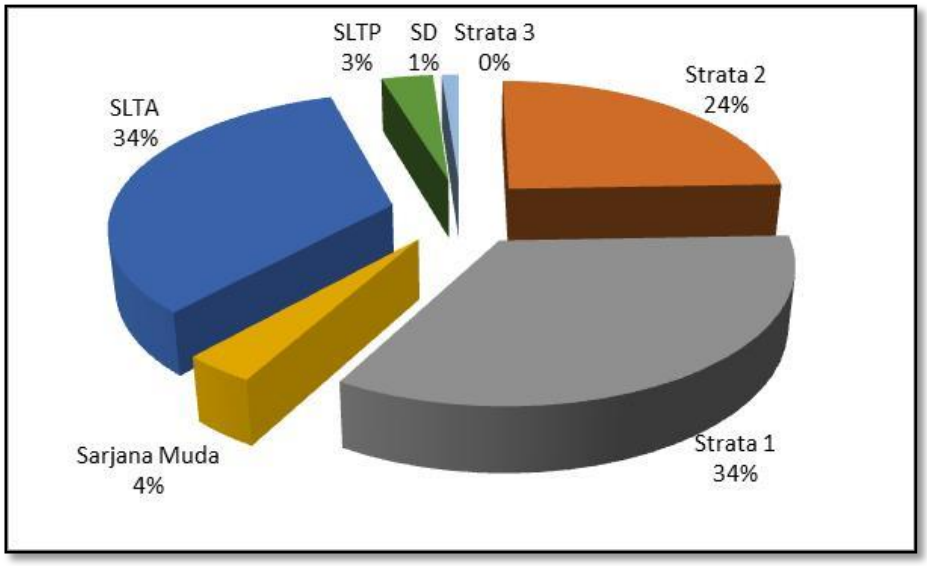
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional tertentu dibandingkan fungsional umum, dimana jabatan Fungsional Umum berjumlah 62 orang dan Fungsional Tertentu berjumlah 4 orang. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar dari pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	7	14	21
3.	Strata 1	15	14	29
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	SLTA	21	8	29
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	1	-	1
	Jumlah	**48**	**38**	**86**

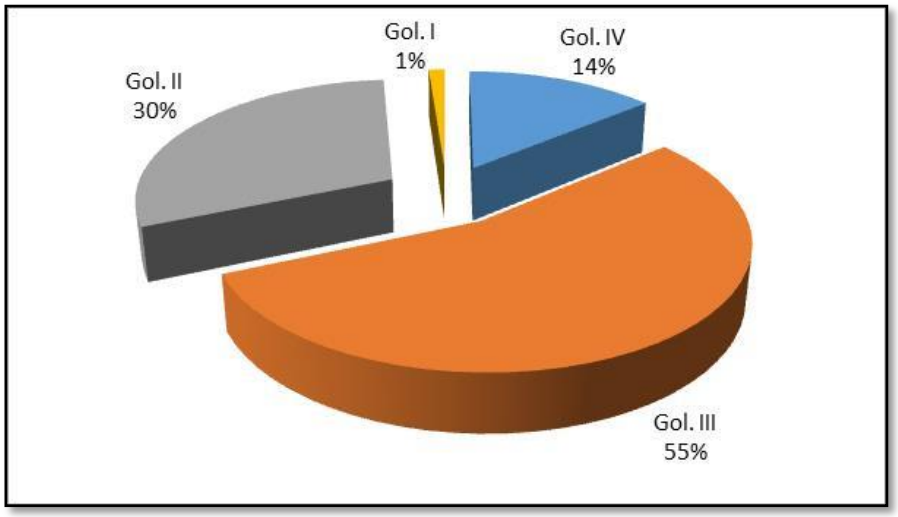
Grafik 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, pada tahun 2020 kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 24% berpendidikan S2 atau sebanyak 21 orang, 34% berpendidikan S1 atau sebanyak 29 orang, 4% berpendidikan D3 atau sebanyak 3 orang, berpendidikan SLTA sebesar 34% atau sebanyak 29 orang, berpendidikan SLTP sebesar 3% atau sebanyak 3 orang dan berpendidikan SD sebesar 1% atau sebanyak 1 orang.

Sementara itu, kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan secara berurutan persentasenya adalah Gol. IV sebesar 14% atau sebanyak 12 orang, Gol. III sebesar 55% atau sebanyak 47 orang dan Gol. II sebesar 30% atau sebanyak 26 orang dan Gol. I sebesar 1% atau sebanyak 1 orang. Ini menunjukkan bahwa pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai Gol. III. Potret kekuatan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan



1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah (PD) utama di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Bappeda sebagai badan yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda sebagai Perangkat Daerah (PD) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Sumataera Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan meyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional. Sebagaimana diberlakukannya peraturan perundangan-undangan yang baru terkait dengan implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Bappeda khususnya sebagai penyelenggara urusan penunjang perencanaan harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang baru untuk perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses perencanaan pembangunan antara lain:

1. Kebutuhan data dan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketersediaan data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan.
2. Ketersediaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas Sumberdaya Manusia (SDM) perencana sebagai pelaksana perencanaan pembangunan daerah.
3. Sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antar Provinsi dengan Pemerintah Pusat.
4. Kualitas dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan analisa terhadap indikator-indikator pembangunan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilannya.

5. Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya, menjadi masukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan yang akan datang.

1.4 Sistimatika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berpedoman pada Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan :

a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
b. Aspek strategis organisasi
c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan :

a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
b. Hasil Pengukuran Kinerja
c. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

   1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
   4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
   5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
   6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

d. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja Esselon II
2) Lain-lain yang dirasa perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis tahun 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan, serta perjanjian kinerja organisasi perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
8. Penutup

Sehubungan dengan peraturan tersebut, maka pada Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada Bab IV hanya memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera".

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat

Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of belonging maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dalam bentuk 5 (lima) misi. Tujuan pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berada pada misi ke 2 yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur, meningkatnya integritas dan kinerja aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan dua pada misi kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, melalui tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat
   Tujuan yang akan dicapai selama periode Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas".

2) Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat
   Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :
   1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
   2. Meningkatkan tata kelola organisasi.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan indikator kinerja masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke					
					1	2	3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan yang diacu oleh OPD Provinsi dan Kab/Kota	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran jangka menengah, maka disusunlah strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Strategi Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas setiap tahun selama periode 2016-2021 adalah :

1. Penguatan kelembagaan melalui pengimplementasian SOP kerja Bappeda
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparat perencana dalam diklat perencanaan pembangunan
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai
4. Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan
5. Penyajian laporan yang lengkap, jelas dan terukur dan tepat waktu
6. Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT).
7. Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi
8. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif.
9. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan.
10. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaanpembangunan daerah.
12. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistime-monev.
13. Membangun karakter (caracter building) ASN Bappeda.
14. Penyelenggaraan sosialisasi dan konsultasi public dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
15. Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku.
16. Meningkatkan peranan Sisem Pengendalian Interen Pemerintah

2) Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatur
2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN

4. Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
5. Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan
6. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
7. Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan yang transparan, akuntabel,dan akurat
8. Menerapkan e-planning dan e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
9. Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT)
10. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah
11. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan
12. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
13. Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat
14. Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem e-monev
15. Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan caracter building ASN
16. Penegakan penerapan peraturan keuangan
17. Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 2.2 di bawah :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	• Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi	• Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan
		• Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan	• Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan yang transparan, akuntabel, dan akurat
		• Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan	• Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	
		• Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistim e-monev	• Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem *e-monev*
		• Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT)	• Menerapkan e-planning dan e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasidalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
		• Terpublikasinya dokumen perencanaan pembangunan di berbagai media informasi	• Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bappeda • Publikasi proses penyusunan dokumen perencanaan di berbagai media, seperti website, media cetak dan elektronik
		• Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat, kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif	• Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah • Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan
		• Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunaan	• Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
	Meningkatkan tata kelola organisasi	• Menyajikan laporan yang lengkap, jelas dan terukur	• Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda • Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		• Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	• Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
		• Penyempurnaan dan penerapan SOP Bappeda	• Evaluasi dan revisi SOP Bappeda • Penerapan SOP secarakonsisten
		• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana	• Partisipasi ASN Perencanadalampelatihan danbimtekperencanaan • Peningkatan kuantitas dan kualitas fungsional perencana
		• Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	• Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatur • Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan
		• Membangun karakter (*caracter building*) ASN Bappeda.	• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN • Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan *caracter building* ASN
		• Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku	• Penegakan penerapan peraturan keuangan
		• Meningkatkan peranan SPIP	• Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2020

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2020 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 seperti pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2020

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan yang diacu oleh OPD Provinsi dan Kab/Kota	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	%	100
		Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2020.

Perjanjian Kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2020 sebagaimana lampiran I dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 16 November 2020 sehubungan adanya perubahan anggaran akibat pandemi COVID-19. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :	100%
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Sumber : Perubahan PK Tahun 2020

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2020 tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 11.175.635.881,- yang digunakan untuk melaksanakan 8 program dengan 65 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Program		Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.278.368.923	APBD
		2.	Program Pembangunan Data dan Informasi Pembangunan	210.624.628	APBD
		3.	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.552.773.808	APBD
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.027.134.125	APBD
		2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	636.951.314	APBD
		3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	67.500.000	APBD
		4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.220.000	APBD
		5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	401.063.083	APBD
	Jumlah			**11.175.635.881**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini dilaporkan akuntabilitas kinerja meliputi hasil pengukuran capaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hasil analisis pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta akuntabilitas keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangak Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan :	%	100	100	100	Sangat tinggi
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra					
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja					
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD					
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS					
2.	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	100	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian						100	Sangat tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan) adalah dengan predikat sangat baik (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) dengan predikat sangat baik (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda secara rata-rata adalah sangat baik (100%).

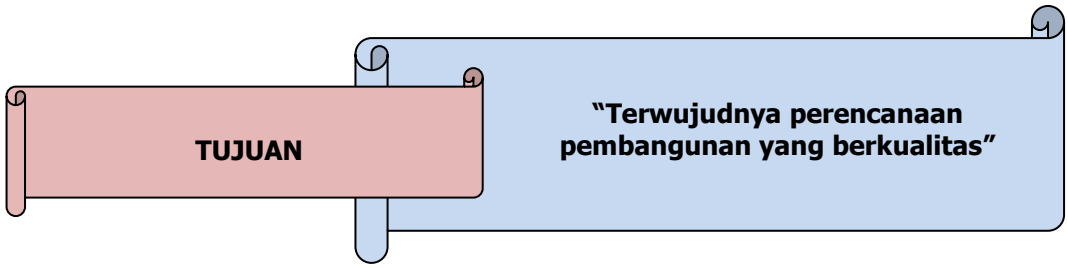
Perbandingan capaian Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2016 – 2020 dijabarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian					Persentase Capaian				
				2016	2017	2018	2018	2020	2016	2017	2018	2018	2020	2016	2017	2018	2018	2020
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra																
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja																
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD																
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS																
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB 71,24	BB 73,28	BB 73,75	BB 71,72	BB 72,51	100	100	100	100	100

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Periode Renstra 2016-2021, dapat dilihat pada uraian berikut :



Guna mewujudkan misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan menetapkan tujuan yaitu ***Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas***. Melalui tujuan tersebut diharapkan tersedianya dokumen perencanaan daerah yang valid sehingga dapat memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan daerah yang memberikan dampak terhadap stabilitas makroekonomi. Pencapaian tujuan pertama ini dapat dilihat dari realisasi indikatornya sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan yang diacu oleh OPD Provinsi dan Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Dilihat dari realisasi indikator kinerja diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas telah terpenuhi. Hal ini diketahui dari capaian indikator kinerja tujuan yaitu persentase sinkronisasi dokumen perencanaan yang diacu oleh OPD Provinsi dan Kab/Kota dengan realisasi 100%.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, maka sasaran kinerja Bappeda salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui kesesuaian antar dokumen perencanaan.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang pertama ini ditetapkan melalui indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1
Tahun 2020

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan							
Indikator Kinerja Sasaran		**Cara Penghitungan**	**Satuan**	**Target Kinerja**	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Predikat**
Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan :		= (Total Persentase Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara berbagai dokumen (point a-d)) / 4	**%**	**100**	**100**	**100**	**Sangat tinggi**
-	Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	= (Total Sasaran dan Indikator ditampung di Renstra / Total Sasaran dan Indikator di RPJMD terkait Bappeda) x 100%	%	100	100	100	
-	Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	= (Total Sasaran dan Indikator yang ada di Renja / Total Sasaran dan Indikator di Renstra Tahun Berkenaan) x 100%	%	100	100	100	
-	Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	= (Total Sasaran dan Indikator yang ada di RKPD / Total Sasaran dan Indikator di RPJMD Tahun Berkenaan) x 100%	%	100	100	100	
-	Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	= (Total Sasaran dan Indikator yang ada di KUA/PPAS / Total Sasaran dan Indikator di RKPD) x 100%	%	100	100	100	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sasaran meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang diukur melalui indikator kinerja persentase kesesuaian antar dokumen

perencanaan dapat dipenuhi dengan realisasi capaian sebesar 100%. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang pertama ini digambarkan melalui 3 (tiga) tolok ukur kinerja yang meliputi :

a) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra

Tolok ukur kinerja ini ditentukan melalui kesesuian sasaran dan indikator sasaran Renstra dengan RPJMD. Dalam hal ini, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra OPD telah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dimana penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dari 46 (empat puluh enam) sasaran pembangunan dan 106 (seratus enam) Indikator Kinerja dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 dijabarkan ke dalam Renstra SKPD 2016–2021 yang tersebar dibeberapa SKPD dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100 % sebagaimana dijelaskan dalam tabel :

Tabel 3.6
Kesesuaian sasaran dan indikator RPJMD dengan Renstra

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas I : Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	Biro Bintal dan Kesra	100	100
				Peringkat Kafilah Sumatera Barat dalam MTQ Nasional	Biro Bintal dan kesra	100	100
		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi berangkat haji	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Sekolah Menengah dengan system	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan	Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool	Dinas Pendidikan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		boarding scholl yang bernuansa islami	karakter	yang bernuansa islami			
		Sekolah Menngah yang bernuansa islami	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau	Dinas Pendidikan	100	100
		Pondok pesantren dengan system boarding school	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren dan sekolah agama	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumbar	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Badan Kesbangpol	100	100
		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	Badan Kesbangpol	100	100
		Konflik social	Meningkatnya Keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
			Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Dinas Pol PP dan Damkar	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
3	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : - Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Badan Kesbangpol	100	100
		Angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Badan Kesbangpol	100	100
		Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang adat dan budaya minangkabau	Dispora	100	100
			Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya kreatifitas pemuda yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional	Dispora	100	100
			Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Indeks penegakan Peraturan daerah	Dinas Satpol PP	100	100
			Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi	Dinas Satpol PP	100	100
			Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumbar	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Dinas Satpol PP	100	100
		Penanganan	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Dinas Sosial	100	100
		Rehabilitasi	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)yang mandiri	Dinas Sosial	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4.	Meningkatnya kesalehan sosial Masyarakat dalam penanganan masalah sosial	Persentase pendistribusian zakat, infak dan sedekah	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan penyaluran zakat dari badan amil zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
5	Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya : MUI, KAN		Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya :MUI, KAN	Biro Bintal dan Kesra	100	100
				Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu, KAN, LPM	DinasPMD	100	100
6.	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah mata budaya	Dinas Kebudayaan	100	100
		Peningkatan event seni dan budaya	Meningkatnya diplomasi budaya dalam dan luar negeri	Jumlah event/diplomasi budaya	Dinas Kebudayaan	100	100
		Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan warisan	Jumlah warisan budaya yang dilindungi : - Cagar Budaya yang dilindung - WBTB yang ditetapkan	Dinas Kebudayaa	100	100
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
				Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100
		Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Standar 40 atau 80 PL/orang/ tahun	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun	BPSDM	100	100
		Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persayaratan jabatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100
				Akreditasi pelatihan pada BPSDM	BPSDM	100	100
		Perangkat daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70%	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
				Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	BKD	100	100
2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	Pegawai yang mencapai kinerja baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	Inspektorat	100	100
				Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100
		Perangkat Daerah Prov menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)					
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan	Opini BPK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Bakeuda	100	100
				Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah	Bakeuda	100	100
				Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD	Bakeuda	100	100
				Persentase Tepat Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban APBD ke DPRD	Bakeuda	100	100
		Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP)	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, OPD Provinsi dan Kab/Kota	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Inspektorat	100	100
			Meningkatannya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	Biro Organisasi	100	100
				Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB	Biro Organisasi	100	100
				Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan SAKIP	Biro Organisasi	100	100
		Tingkat Kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan	Inspektorat	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				(APIP) Provinsi Sumatera Barat			
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat	100	100
		Penggunaan E-Procurement terhadap pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya mutu pelelangan barang dan jasa pemerintah	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seluruh SKPD berdasarkan Perpres	Biro AP2BMD	100	100
		Indeks e-Government Provinsi	Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas	100	100
		Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Huma	100	100
				Penyebarluasan Provinsi Sumatera Barat	Biro Humas	100	100
		Instansi Pemerintah yang memilki Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B keatas)	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
		Tertib Arsip	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarak an Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4	Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100
		Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100
		Meningkatnya ketersediaan dan kuaalitas Produk Hukum dengan yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	Produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
			Produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dantidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
				Jumlah Inovasi pelayanan tercipta pada UKPP Provinsi dan Kab/Kota melalui kompetisi pelayanan prima dan Inovasi pelayanan publik	Biro Organisasi	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)		Hasil Penilaian Survey Kepusasan Masyarakat.	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3: Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan							
1	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan	100	100
		Harapan lama sekolah		Harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan	100	100
		Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Rata-rata lama sekolah Dikmen	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	100	100
				Indek Integritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
			Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat	Dinas Pendidikan	100	100
				Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti	Dinas Pendidikan	100	100
				Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	100	100
				Indek Itregritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
				Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya	Dinas Pendidikan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami	Dinas Pendidikan	100	100
				Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau	Dinas Pendidikan	100	100
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
				APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah		Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus SMA		Angka Putus Sekolah di SMA/SMK	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus SMK					
4	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peringkat UN di tingkat nasional	Dinas Pendidikan	100	100
				Angka Kelulusan SMA/MA	Dinas Pendidikan	100	100
				Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri	Dinas Pendidikan	100	100
		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)		Angka Kelulusan SMK	Dinas Pendidikan	100	100
				Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Jumlah kunjungan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Jumlah Anggota Baru	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
			Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam	Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
				Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
			Mewujudkan Perpustakaan Digital	Jumlah Entrian Database Bahan Pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
6	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Dalam Pengembilan Kebijakan Pembangunan	Balitbang	100	100
Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Angka harapan hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	Dinas Kesehatan	100	100
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF)	Dinas Kesehatan	100	100
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	RSUD Solok	100	100
				Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	100	100
		Rumah Sakit Provinsi Terakreditasi	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	100	100
				Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi	RSUD Solok	100	100
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	RSUD Solok	100	100
				Av Los	RSJ HB Saanin	100	100
			Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Indek Kepuasan Masyarakat	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100
				Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100
				Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Pariaman	100	100
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD Pariaman	100	100
			Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSJ HB Saanin	100	100
		Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan		100
2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kualitas penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	DPPKBKPS	100	100
		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)		CPR (Prelevansi Pemakaian Kontrasepsi)	DPPKBKPS	100	100
		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)		Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	DPPKBKPS	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		ASFR 15-19 tahun			DPPKBKPS	100	
		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)			DPPKBKPS	100	
		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)		Laju Perttumbuhan Penduduk (LPP)	DPPKBKPS		100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Capaian Medali Emas dalam Kejurnas PPLP	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Nasional Kejurnas Antar PPLP POPNAS POPWIL Peparpelnas Peparnas Pornas Soina	Dinas Pemuda dan Olahraga		100
				Jumlah Atlet Sumatera Barat yang mewakili Indonesia di Event Olahraga Tingkat Internasional	Dinas Pemuda dan Olahraga		
4	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Peran pemuda dalam pembangunan (organisasi kepemudaan yang aktif)	Meningkatnya Pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	jumlah pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	Dinas Pemuda dan Olahraga	100	100
5	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Persentase organisasi perempuan yang aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Persentase OPD yang menerapkan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				anggaran berbasis gender	dan Perlindungan Anak		
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100
				Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100
Prioritas 5 : **Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**							
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya diversifikasi pangan	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pangan	100	100
		Persentase peningkatan produksi : a. Padi b. Jagung c. Cabe d. Daging e. Telur f. Ikan		Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) a. Konsumsi Energi b. Konsumsi Protein	Dinas Pangan	100	100
			Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Mempertahankan ketersediaan minimal terhadap energi dan protein a. Konsumsi Energi b. Konsumsi Protein	Dinas Pangan	100	100
				Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumbar	Dinas Pangan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan	Teratasinya masyarakat rawan pangan	Dinas Pangan	100	100
			Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	a. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Pangan	100	100
				b. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	Dinas Pangan	100	100
			Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	a. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	Dinas Pangan	100	100
				b. Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	Dinas Pangan	100	100
2	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi b. Persentase Peningkatan Kawasan Agribisnis	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Distanhorbun	100	100
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Pemberdayaan penyuluh	Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan	Distanhorbun	100	100
			Berkembangnya pertanian organik	Bertambahnya luasan pertanian organik	Distanhorbun	100	100
			Meminimalkan luas serangan yang disebabkan OPT dan bencana alam	Persentase penurunan luas serangan hama dan penyakit tanaman	Distanhorbun	100	100
			Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	a. Peningkatan Produksi Daging	DPKH	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				b. Peningkatan Produksi Telur	DPKH	100	100
				c. Peningkatan Populasi Ternak Sapi	DPKH	100	100
			Meningkatnya produktifitas ternak	a. Service per conception (S/C) (jumlah pelayanan kawin per kebuntingan)	DPKH	100	100
				b. Persentase anak yang lahir dari embrio transfer pada ternak sapi	DPKH	100	100
			Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	Jumlah peternak yang memiliki sertifikasi farm di Sumatera Barat	DPKH	100	100
			Meningkatnya status kesehatan hewan	a. Tingkat kejadian kasus penyakit brucellosis dan hog cholera	DPKH	100	100
				b. Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis	DPKH	100	100
			Meningkatnya uni usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi	Persentase unit usaha produk hewan yang memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Sertifikat Halal dan ISO	DPKH	100	100
Prioritas 6 : **Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Pertumbuhan ekonomi	Peningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat		Lintas Perangkat OPD	100	100
		PMA		a. Nilai Realisasi Investasi	DPM dan PTSP		
		PMDN		b. PMA		100	100
				c. PMDN		100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Persentase izin penanaman modal	DPM dan PTSP	100	100
				Jumlah calon investor yang berminat serius	DPM dan PTSP	100	100
				Jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip	DPM dan PTSP	100	100
			Meningkanya kualitas pelayanan satu pintu Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu	Persentase penyelsaian masalah penanaman modal	DPM dan PTSP	100	100
				Persentase perizinan yang diberikan tepat waktu	DPM dan PTSP	100	100
				Indes Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPM dan PTSP	100	100
		Peningkatan Nilai Ekspor	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.	Peningkatan omzet pasar rakyat	Dinas Perindag	100	100
				Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Dinas Perindag	100	100
				Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi)	Dinas Perindag	100	100
		PDRB per Kapita	Meningkatnya kinerja perdagangan luar negeri.	Nilai ekspor bersih perdagangan	Dinas Perindag	100	100
				Jumlah sertifikat mutu produk yang diterbitkan	Dinas Perindag	100	100
					Lintas OPD	100	100
		Indeks Gini			Lintas OPD	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Nusantara	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	Dinas Pariwisata	100	100
		Mancanegara	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)	Dinas Pariwisata	100	100
			Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara per kunjungan (Triliun Rp)	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Peningkatan Nilai Ekspor	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dalam negeri dan luar negeri	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani(IKU)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya laut	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
			Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
			Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan dan bantuan social	Dinas Sosial	100	100
				Jumlah Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha	Dinas Sosial	100	100
				Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terlayani	Dinas Sosial	100	100
				Jumlah WRSE yang Bimbingan Teknis dan bantuan Sosial	Dinas Sosial	100	100
			Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan social	Jumlah Kab/Kota yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial	Dinas Sosial	100	100
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	Persentase Tenaga kerja yang berkompeten	Disnakertrans	100	100
				Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan pemagangan	Disnakertrans	100	100
				Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan produktivitas	Disnakertrans	100	100
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi	Disnakertrans	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan tenaga kerja sektor formal	Disnakertrans	100	100
				Persentase Serapan tenaga kerja sektor informal	Disnakertrans	100	100
				Persentase Pendidikan BKK di SMK/ perguruan tinggi/ lembaga	Disnakertrans	100	100
				Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia kerja	Disnakertrans	100	100
				Persentase Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat	Disnakertrans	100	100
				Persentase Tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai tata cara/mekanisme pengguna tenaga kerja asing	Disnakertrans	100	100
3	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	Meningkatnya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Jumlah tercapainya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
Prioritas 9 : Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur							
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi	Persentase peningkatan Penumpang terangkut Darat Laut Udara ASDP KA	Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi	Persentase penumpang terangkut transportasi publik a. Darat b.Laut c.Udara d.ASDP e.KA	Dinas Perhubungan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Rasio angka kecelakaan lalu lintas (kematian per 10.000 registrasi kend)	Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata Indeks kinerja infrastrukur irigasi provinsi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	Dinas PSDA	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
		Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan - air minum - Rumah tangga bersanitasi - Penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Dinas PUPR	100	100
				Persentase cakupan air minum	Dinas PUPR	100	100
				Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Dinas PUPR	100	100
			Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		100	100
6	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Rasio elektrifikasi	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100
				Jumlah Infrastruktur EBT - PLTMH - PLTS	Dinas ESDM	100	100
Prioritas 10 : **Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam**							
1	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangun an dan tata ruang	Peningkatan Kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Dinas Lingkungan hidup	Terkendali nya beban pencemaran dan kerusakan Dinas Lingkungan hidup dari usaha/kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
			Meningkatnya pencegahan dampak lingkungan dan konservasi SDA sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan Dinas Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Dinas Lingkungan hidup Strategis	Dinas Lingkungan hidup	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Penurunan dampak lingkungan akibat timbulan sampah dan limbah B3	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade adipura dan gerakan sumber bersih	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase penurunan volume sampah melalui imolementasi 3 R (redice, reuse, recyle)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentse peningkatan limbah B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dinas Lingkungan hidup	100	100
			Meningkatnya efektifitas penanganan kasus Lingkungan hidup dan penaatan hukum Lingkungan hidup	Persentase kasus Lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Dinas Lingkungan hidup	100	100
			Meningkatnya peran aktif masyarakt dan stakeholder dalam pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	Dinas Lingkungan hidup	100	100

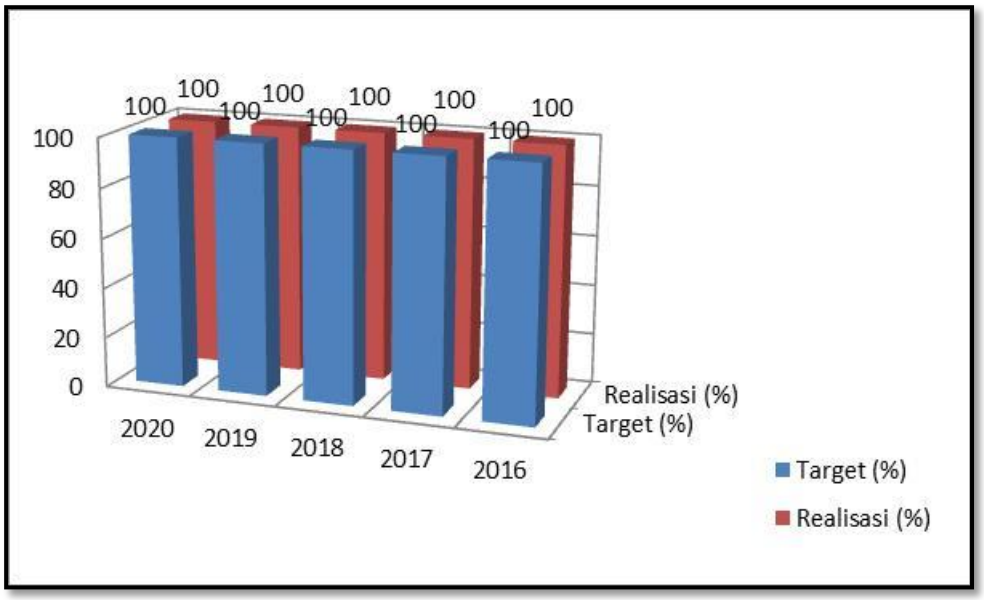
No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	Dinas Lingkungan hidup	100	100
3	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani		Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	Dinas Kehutanan	100	100
			Terwujudnya kepastian dan optamalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukan nya	Persentase unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya	Dinas Kehutanan	100	100
				Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Dinas Kehutanan	100	100
				Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Dinas Kehutanan	100	100
			Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	Dinas Kehutanan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	Meningkatnya Kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencanan	BPBD	100	100
5	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana(%)	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	BPBD	100	100
		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	BPBD	100	100
			Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	BPBD	100	100
6	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum	Meningkatnya tampungan sumber-sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
			Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas PSDA	100	100
			Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas PSDA	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
7	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Meningkat nya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan yang diukur melalui indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan tolok ukur Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra dapat dipenuhi sesuai dengan target selama masa kerja Renstra 2016-2020 sebesar 100%.

Sementara itu, jika realisasi indikator kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2020 (%)		Renstra Bappeda (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	100 100	100 100	100 100	100 100

b) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja

Renstra merupakan rencana srategis SKPD yang bersifat jangka menengah sebagai wujud implementasi dari RPJMD. Renstra tersebut dijabarkan kedalam perencanaan tahunan yang dikenal dengan Renja. Sasaran dan indikator sasaran yang terdapat pada Renja SKPD haruslah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra masing-masing SKPD. Penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, dari 128 (seratus dua puluh delapan) sasaran pembangunan dan 230 (dua ratus tiga puluh) Indikator Kinerja dalam dokumen Renstra SKPD 2016–2021 dijabarkan ke dalam Renja SKPD Tahun 2020 menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) sasaran dan 230 (dua ratus tiga puluh) indikator kinerja sasaran dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100 % sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Kesesuaian sasaran dan indikator Renstra dengan Renja

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 1: **Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat**							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
2	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan	Persentase penyaluran zakat, infak dan sedekah	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Persentase penyaluran zakat, infak dan sedekah	Biro Bintal dan Kesra	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	ajaran agama dalam kehidupan masyarakat		dalam kehidupan masyarakat				
3	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta pemuda	Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi berangkat haji		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi berangkat haji	Biro Bintal dan Kesra	100	100
4	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang bernuansa islami	Meningkatnya integrritas peserta didik	Indek integritas siswa	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yang bernuansa surau	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yng bernuansa islami	Dinas Pendidikan	100	100
6	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Tersusunya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter disetiap satuan pendidikan	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan pemhaman dan da penagganan nilai-nilai buaya bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	100	100
7	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yang bernuansa islam	Dinas Pendidikan	100	100
8	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Badan Kesbangpol	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
9	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Badan Kesbangpol	100	100
10	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
11	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Dinas Satpol PP	100	100
12	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Badan Kesbangpol	100	100
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Badan Kesbangpol	100	100
14	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang adat dan budaya minangkabau	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang adat dan budaya minangkabau	Dispora	100	100
15	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya kreatifitas pemuda yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya kreatifitas pemuda yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional	Dispora	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
16	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Dinas sosial	100	100
17	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)yang mandiri	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)yang mandiri	Dinas sosial	100	100
18	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan penyaluran zakat dari badan amil zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan Kesra	100	100
19	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Biro Bintal dan kesra	100	100
20	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya : - MUI - KAN	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya : - MUI - KAN	Biro Bintal dan Kesra	100	100
21	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu, KAN, LPM	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu KAN, LPM	Dinas PMD	100	100
		Peningkatan partisipasi perantau dalam proses pembangunan		Peningkatan partisipasi perantau dalam proses pembangunan	Biro Kerjasama Pembangun an dan Rantau	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
22	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah mata budaya	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah mata budaya	Dinas Kebudayaan	100	100
23	Meningkatnya diplomasi budaya dalam dan luar negeri	Jumlah event/diplomasi budaya	Meningkatnya diplomasi budaya dalam dan luar negeri	Jumlah event/diplomasi budaya	Dinas kebudayaan	100	100
24	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya	Jumlah warisan budaya yang dilindungi : - Cagar Budaya yang dilindungi - WBTB yang ditetapkan	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya	Jumlah warisan budaya yang dilindungi : - Cagar budaya yang dilindungi - WBTB yang ditetapkan	Dinas Kebudayaan	100	100
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
		Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100
3	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun	BKD	100	100
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	BPSDM	100	100
		Akreditasi pelatihan pada BPSDM	Meningkatnya pengembangan kompetensi dan kualifikasi dan aparatur	Persentase lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan	BPSDM	100	100
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
		Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	Meningkatnya dukungan tata kelola	Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	BKD	100	100
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	Meningkatnya peran inspektorat provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	Inspektorat	100	100
		Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100
7	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
8	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, OPD Provinsi dan Kab/Kota	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Meningkatnya Akunntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi sumatera barat	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas	Inspektorat	100	100
9	Meningkatannya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	Biro Organisasi	100	100
		Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB		Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB	Biro Organisasi	100	100
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan SAKIP		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan SAKIP	Biro Organisasi	100	100
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Inspektorat	100	100
11	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan dipemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	Inspektorat	100	100
12	Meningkatnya mutu pelelangan barang dan jasa pemerintah	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seluruh SKPD berdasarkan Perpres	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu	Biro AP2BMD	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
13	Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas	100	100
14	Meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Humas	100	100
		Penyebarluasan Provinsi Sumatera Barat		Penyebarluasan Provinsi Sumatera Barat	Biro Humas	100	100
15	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
16	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan professional	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
17	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Mewujudkan pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	100	100
18	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas dengan kesesuaian antar dokumen	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100
19	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintahan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
20	Produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Terbentuknya produk hukum provinsi dalam rangka klarifikasi oleh tingkat pusat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
21	Produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dantidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan oleh provinsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi	Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
		Jumlah Inovasi pelayanan tercipta pada UKPP Provinsi dan Kab/Kota melalui kompetisi pelayanan prima dan Inovasi pelayanan publik		Jumlah Inovasi pelayanan tercipta pada UKPP Provinsi dan Kab/Kota melalui kompetisi pelayanan prima dan Inovasi pelayanan publik	Biro Organisasi	100	100
		Hasil Penilaian Survey Kepusasan Masyarakat.		Hasil Penilaian Survey Kepusasan Masyarakat.	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3: **Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan**							
1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Rata-rata lama sekolah Dikmen	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Rata-rata lama sekolah Dikmen	Dinas Pendidikan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	100	100
		Indek Integritas Siswa		Indek Integritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
3	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat	Dinas Pendidikan	100	100
		Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti		Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti	Dinas Pendidikan	100	100
		Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan		Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	100	100
		Indek Itregritas Siswa		Indek Itregritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
		Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya		Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya	Dinas Pendidikan	100	100
		Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami		Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami	Dinas Pendidikan	100	100
		Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau		Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau	Dinas Pendidikan	100	100
4	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	Dinas Pendidikan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C		APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah		Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus Sekolah di SMA/SMK		Angka Putus Sekolah di SMA/SMK	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peringkat UN di tingkat nasional	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peringkat UN di tingkat nasional	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Kelulusan SMA/MA		Angka Kelulusan SMA/MA	Dinas Pendidikan	100	100
		Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri		Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Kelulusan SMK		Angka Kelulusan SMK	Dinas Pendidikan	100	100
		Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri		Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri	Dinas Pendidikan	100	100
6	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Jumlah kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Jumlah kunjungan perpustakaan	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
		Jumlah Anggota Baru		Jumlah Anggota Baru	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
7	Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam	Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam	Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara		Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
8	Mewujudkan Perpustakaan Digital	Jumlah Entrian Database Bahan Pustaka	Mewujudkan Perpustakaan Digital	Jumlah Entrian Database Bahan Pustaka	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
9	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Dalam Pengembilan Kebijakan Pembangunan	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Dalam Pengembilan Kebijakan Pembangunan	Balitbang	100	100
Pioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak		Dinas Kesehatan	100	100
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF)		Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan difaskes	Dinas Kesehatan	100	100
		Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar		Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	Dinas Kesehatan	100	100
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi	Meningkatnya kwalitas pelayanan	Akreditasi RS	RSUD Solok	100	100
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal 1 per kecamatan	Dinas Kesehatan	100	100
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Indek Kepuasan Masyarakat	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Terakreditasinya Rumah Sakit	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100
		Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah sakit	RSUD Pariaman	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD Pariaman	100	100
4	Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSJ HB Saanin	100	100
5	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan sumbar Sakato	Persentase kepesertaan sistim jaminan sosial nasional BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100
6	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Nasional - Kejurnas Antar PPLP - POPNAS - POPWIL - Peparpelnas - Peparnas - Pornas Soina	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Nasional - Kejurnas Antar PPLP - POPNAS - POPWIL - Peparpelnas - Peparnas - Pornas Soina	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga	100 100	100 100
		Jumlah Atlet Sumatera Barat yang mewakili Indonesia di Event Olahraga Tingkat Internasional					
7	Meningkatnya Pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	Jumlah pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	Meningkatnya pemuda berkarakter dan mandiri	Jumlah pemuda berkarakter dan mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	100	100
8	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)		100	100
		c. Persentase organisasi perempuan yang aktif		c. Persentase organisasi perempuan yang aktif		100	100
		d. Persentase OPD yang		d. Persentase OPD yang		100	100
		e. menerapkan anggaran berbasis gender		e. menerapkan anggaran berbasis gender		100	100
		f. Partisipasi angkatan kerja perempuan		f. Partisipasi angkatan kerja perempuan		100	100
		g. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen		g. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen		100	100
9	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
10	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
11	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
12	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase satuan kerja perangkat daerah provinsi yang memiliki data terpilah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
13	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)		khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	Anak		
Prioritas 5 : **Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**							
1	Meningkatna diversifikasi pangan	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)	Tumbuh dan berkembangnya kelompok pemanfaatan pekarangan penerima manfaat	Dinas Pangan	100	100
		Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) a. Konsumsi Energi b. Konsumsi Protein	Pemasyarakatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya upaya-upaya pemasyarakatan konsumsi pangan B2SA melalui berbagai bentuk dan media.	Dinas Pangan	100	100
2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Mempertahankan ketersediaan minimal terhadap energi dan protein c. Konsumsi Energi d. Konsumsi Protein	Pengembangan pangan lokal melalui kerjasama dengan dengan perguruan tinggi	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pangan lokal sebagai alternatif pengganti beras dan terigu	Dinas Pangan	100	100
		Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumbar			Dinas Pangan	100	100
3	Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan	Teratasinya masyarakat rawan pangan	Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya dan tersalurkannya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Dinas Pangan	100	100
4	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	a. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah	Terselenggaranya pemantauan harga pangan dan jaringan informasi harga di Kab/Kota	Dinas Pangan	100	100
				Tersedianya hasil dan analisis tentang harga pangan sebagai bahan perumusan kebijakan	Dinas Pangan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		b. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	Menyusunan Prognosa neraca harga pangan	Tersedianya data prognosa neraca harga pangan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga pangan	Dinas Pangan	100	100
5	Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	a. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Sampel Uji	Dinas Pangan	100	100
		b. Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar	Terlaksananya surveilen kebun pelaku usaha pangan segar hasil pertanian yang telah memiliki sertifikat prima	Dinas Pangan	100	100
6	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan kawasan sentra produksi TPH	Distanhorbun	100	100
				Persentase peningkatan kawasan sentra produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
7	Pemberdayaan penyuluh	Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan	Peningkatan SDM Aparatur dan pelaku usaha pertanian	Persentase kawasan peningkatan SDM Aparatur dan pelaku usaha pertanian	Distanhorbun	100	100
8	Berkembangnya pertanian organik	Bertambahnya luasan pertanian organik	Berkembangnya pertanian organik	Berkembangnya pertanian organik melalui SLAPO dan demplot sayuran organik	Distanhorbun	100	100
				Berkembangnya pertanian organik melalui Sertifikasi pertanian organik	Distanhorbun	100	100
9	Meminimalkan luas serangan yang disebabkan	Persentase penurunan luas serangan hama dan penyakit	Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Gerakan Pengendalian Hama Utama	Distanhorbun	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	OPT dan bencana alam	tanaman		Tanaman Perkebunan			
10	Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	a. Peningkatan Produksi Daging	Pengembangan Kawasan Sentra produksi Peternakan	Meningkatnya Kawasan Sentra Produksi Peternakan	DPKH	100	100
		b. Peningkatan Produksi Telur		Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas	DPKH	100	100
		c. Peningkatan Populasi Ternak Sapi		Meningkatnya Kawasan Agribisnis Sapi Potong	DPKH	100	100
				Terlaksananya registrasi Kandang Usaha Peternakan	DPKH	100	100
11	Meningkatnya produktifitas ternak	a. Service per conception (S/C) (jumlah pelayanan kawin per kebuntingan)	Peningkatan Populasi Ternak	Bertambahnya Populasi ternak	DPKH	100	100
				Jumlah ternak yang di IB dan PKB	DPKH	100	100
		b. Persentase anak yang lahir dari embrio transfer pada ternak sapi		Terlaksananya :1. Transfer Embrio pada ternak sapi, 2. Tersedianya sapi hasil ET	DPKH	100	100
12	Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	Jumlah peternak yang memiliki sertifikasi farm di Sumatera Barat	Registrasi Kandang Usaha Peternakan	Terlaksananya registrasi Kandang Usaha Peternakan	DPKH	100	100
13	Meningkatnya status kesehatan hewan	a. Tingkat kejadian kasus penyakit brucellosis dan hog cholera	Investigasi dan Tanggap Cepat Pengendalian Avian Influenza (AI) dan Penyakit Hewan Menular (PHM) Lainnya di Sumatera Barat	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan	DPKH	100	100
		b. Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis			DPKH	100	100
14	Meningkatnya uni usaha produk hewan yang memenuhi	Persentase unit usaha produk hewan yang memperoleh Nomor Kontrol Veteriner	Membina Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk Mendapatkan	Meningkatnya jumlah unit usaha pangan asal hewan yg memiliki sertifikat NKV	DPKH	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	standar hygiene sanitasi	(NKV), Sertifikat Halal dan ISO	Sertivikasi NKV				
Prioritas 6 : Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.							
1	Peningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	DPM dan PTSP		
		a. PMA		a.PMA (ribu USD)		100	100
		b. PMDN		b.PMDN (Rp. Juta)		100	100
		Persentase izin penanaman modal		Persentase izin penanaman modal yang direalisasikan	DPM dan PTSP	100	100
2	Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Jumlah calon investor yang berminat serius	Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Jumlah Investor	DPM dan PTSP	100	100
		Jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip		Jumlah yang minat investasi	DPM dan PTSP	100	100
3	Meningkanya kualitas pelayanan satu pintu	Persentase penyelsaian masalah penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan satu Pintu	Jumlah permaslaahan Investasi yang diselesaikan	DPM dan PTSP	100	100
		Persentase perizinan yang diberikan tepat waktu		Persentase Perizinan yang dIterbitkan Tepat Waktu	DPM dan PTSP	100	100
		Indes Kepuasan Masyarakat (IKM)		IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	DPM dan PTSP	100	100
4	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.	Peningkatan omzet pasar rakyat	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Dinas Perindag	100	100
		Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi)	Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrologian serta pengawasan barang dan jasa beredar	Persentase barang bertanda SNI, Label dan manual kartu garansi (MKG) dan lain-lain yang diawasi (%)	Dinas Perindag	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
5	Meningkatnya kinerja perdagangan luar negeri.	Nilai ekspor bersih perdagangan	Meningkatnya nilai ekspor non migas daerah	Nilai eksport non migas (juta US$)	Dinas Perindag	100	100
				Jumlah jenis produk non migas yang di ekspor (jenis)	Dinas Perindag	100	100
		Jumlah sertifikat mutu produk yang diterbitkan	Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrologian serta pengawasan barang dan jasa beredar	Jumlah sertifikat mutu produk yang diterbitkan (SNI)	Dinas Perindag	100	100
6	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	100	100
7	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)		Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	100	100
			Meningkatnya kualitas destinasi wisata Sumbar	Jumlah destinasi wisata yang berkembang	Dinas Pariwisata	100	100
				Jumlah Kerjasama Pembangunan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota (Tindak lanjut MOU)	Dinas Pariwisata	100	100
				Terlaksana nya Peduli wisata award	Dinas Pariwisata	100	100
8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara per kunjungan (Triliun Rp)	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif Meningkat nya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Dinas Pariwisata	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK	Dinas Pariwisata	100	100
			Meningkat nya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : **Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**							
1	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Meningkatnya Pemasaran Hasil perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Meningkatnya Produksi Perikanan laut	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Produksi perairan umum	Meningkatnya produksi perikanan perairan umum	Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautanan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautanan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
2	Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan dan bantuan sosial	Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan dan bantuan sosial	Dinas Sosial	100	100
		Jumlah Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha		Jumlah Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha	Dinas Sosial	100	100
		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terlayani		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terlayani	Dinas Sosial	100	100
		Jumlah WRSE yang Bimbingan Teknis dan bantuan Sosial		Jumlah WRSE yang Bimbingan Teknis dan bantuan Sosial	Dinas Sosial	100	100
3	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan social	Jumlah Kab/Kota yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan social	Jumlah Kab/Kota yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial	Dinas Sosial	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	Persentase Tenaga kerja yang berkompeten	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	Persentase Tenaga kerja yang berkompeten	Disnakertrans	100	100
		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan pemagangan		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan pemagangan	Disnakertrans	100	100
		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan produktivitas		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan produktivitas	Disnakertrans	100	100
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi	Disnakertrans	100	100
5	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan tenaga kerja sektor formal	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan tenaga kerja sektor formal	Disnakertrans	100	100
		Persentase Serapan tenaga kerja sektor informal		Persentase Serapan tenaga kerja sektor informal	Disnakertrans	100	100
		Persentase Pendidikan BKK di SMK/ perguruan tinggi/ lembaga		Persentase Pendidikan BKK di SMK/ perguruan tinggi/ lembaga	Disnakertrans	100	100
		Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia kerja		Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia kerja	Disnakertrans	100	100
		Persentase Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat		Persentase Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat	Disnakertrans	100	100
		Persentase Tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai		Persentase Tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai	Disnakertrans	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		tata cara/mekanisme pengguna tenaga kerja asing		tata cara/mekanisme pengguna tenaga kerja asing			
6	Meningkatnya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Jumlah tercapainya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Meningkatnya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Jumlah tercapainya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
Prioritas 9 : Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur							
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	Dinas PUPR	100	100
2	Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi	Persentase penumpang terangkut transportasi publik a. Darat b. Laut b. Udara c. ASDP d. KA	Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi	Persentase penumpang terangkut transportasi publik a. Darat b. Laut c. Udara d. SDP e. KA	Dinas Perhubungan	100	100
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselama tan	Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100
4	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	Dinas PSDA	100	100
5	Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
6	Meningkatnya kawasan terlindungi	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari	Meningkatnya kawasan terlindungi dari	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari	Dinas PSDA	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	dari daya rusak air	daya rusak air	daya rusak air	daya rusak air			
7	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Dinas PUPR	100	100
		Persentase cakupan air minum		Persentase cakupan air minum	Dinas PUPR	100	100
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Dinas PUPR	100	100
8	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100
		Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi	OPD Terkait	100	100
10	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100
		Jumlah Infrastruktur EBT - PLTMH - PLTS		Jumlah Infrastruktur EBT - PLTMH - PLTS	Dinas ESDM	100	100
Prioritas 10 : **Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam**							
1	Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Dinas PUPR	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan Dinas Lingkungan hidup dari usaha/kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Meningkatnya kualitas udara Ambien	Persentase meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan hidup	100	
3	Meningkatnya pencegahan dampak lingkungan dan konservasi SDA sesuai daya dukungdan daya tampung lingkungan hidup	Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatnya penataan lingkungan hidup	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkunganr	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan Dinas Lingkungan hidup	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Dinas Lingkungan hidup Strategis	Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas Lingkungan hidup	100	100
4	Penurunan dampak lingkungan akibat timbulan sampah dan Limbah B3	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade adipura dan gerakan sumber bersih	Penurunan dampak lingkungan akibat timbulan sampah dan Limbah B3	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade adipura dan gerakan sumber bersih	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase penurunan volume sampah melalui		Persentase penurunan volume sampah melalui	Dinas Lingkungan hidup	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		imolementasi 3 R (redice, reuse, recyle)		imolementasi 3 R (redice, reuse, recyle)			
		Persentse peningkatan limbah B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan yang berlaku		Persentse peningkatan limbah B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dinas Lingkungan hidup	100	100
5	Meningkatnya efektifitas penanganan kasus Lingkungan hidup dan penaatan hukum Dinas Lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kasus Lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	Meningkatnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	Dinas Lingkungan hidup	100	100
6	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	Meningkatnya penilaian terhadap peserta/objek PROPER	Persentse Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	Meningkatnya peran serta masyarakat/lembaga dalam pengelolaan sampah	Persentase lembaga/bank sampah	Dinas Lingkungan hidup	100	100

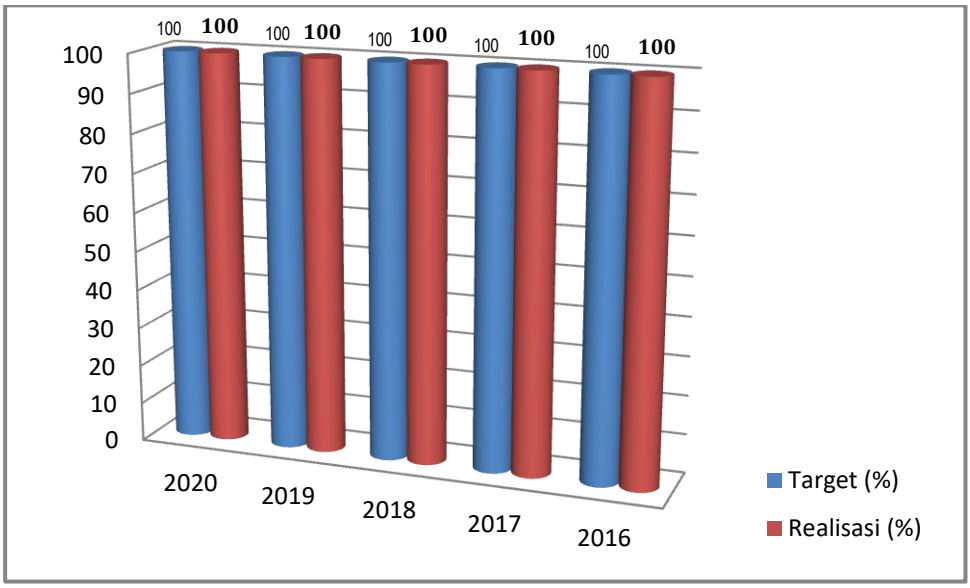
No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
7	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)			Dinas Kehutanan	100	100
8	Terwujudnya kepastiandan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Meningkatnya pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Dinas Kehutanan	100	100
		Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Terwujudnya Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Dinas Kehutanan	100	100
9	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.kemitraan	Meningkatnya kerjasama dalam perencanaan dan pengelolaan hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.kemitraan	Dinas Kehutanan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
10	Meningkat nya Kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase pemahaman tentang bencana	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesiapsigaan menghadapi bencana	Persentase pemahaman masyarakat terhadap bencana	BPBD	100	100
11	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	BPBD	100	100
12	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya penanggapan kejadian bencana	Persentase penanganan tanggap darurat	BPBD	100	100
13	Meningkatnya pemulihan wilayah/daera h pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	BPBD	100	100
14	Meningkatnya tampungan sumber-sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas PSDA	100	100
15	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas PSDA	100	100
16	Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang	Meningkatnya tampungan sumber-sumber	Persentase peningkatan kapasitas	Dinas PSDA	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		terdampak daya rusak air	air	tampungan sumber-sumber air			
17	Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase luas kawasan konservasi dan rehabilitaso	Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase luas kawasan konservasi dan rehabilitaso	Dinas Perikanan dan Kelauatan	100	100

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan yang diukur melalui indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan tolok ukur Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara Renstra dengan Renja tahun 2020 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan target sebesar 100%.

Sementara itu, realisasi indikator kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-

2021 pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2020 (%)		Renstra Bappeda (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan**	100	100	100	100
	- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	100	100	100	100

c) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD

Sasaran dan indikator sasaran pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai dokumen tahunan secara substansi telah konsisten dan telah mempedomani serta mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dari 46 (empat puluh enam) sasaran pembangunan dan 106 (seratus enam) Indikator Kinerja dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 dijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2020 dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100% dimana penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Kesesuaian sasaran dan indikator RPJMD dengan RKPD

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 1: Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakit	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Biro Bintal	100	100
		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Penduduk yang mendaftar dan		Tingkat Kepuasan	Biro Bintal dan Kesra	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		mendapat porsi keberangkatan ibadah haji		terhadap pemberangkatan dan pemulangan haji			
		Sekolah Menengah dengan system boarding school bernuansa islami	Terimplementasi kannya pendidikan berkarakter madani	Terukurnya Integritas Peserta Didik	Dinas Pendidikan	100	100
		Sekolah Menengah yang bernuansa islami	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan pemhaman dan da penagganan nilai-nilai buaya bagi peserta didik	Dians Pendidikan	100	100
		Sekolah menengah yang bernuansa surau	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yang bernuansa surau	Dinas Pendidikan	100	100
		Pondok pesantren dengan system boarding school	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan pemhaman dan da penagganan nilai-nilai buaya bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren dan sekolah agama	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren dan sekolah agama	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam bahaya narkoba	Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Badan Kesbang Pol	100	100
		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Badan kesbangpol	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Konflik sosial	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
3	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : - Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Persentase penurunan kasus maksiat dan narkoba di Provinsi Sumatera Barat	Dinas satpol PP dan Damkar	100	100
		Angka kriminalitas	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
		Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Berkurangnya penyakit masyarakat	Berkurangnya penyakit masyarakat, dan bahaya penyalah gunaan narkoba	Dispora	100	100
			Meningkatnya penegakan pearturan daerah Provinsi Sumatera Barat	Indeks penegakan peraturan daerah	Dinas Satpol PP	100	100
			Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	% Kab/Kota yang melaksanakan opearasi gabungan pemberantasan maksiat	Dinas Satpol PP	100	100
		Penanganan	Menurunnya jumlah angka penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Dinas Sosial	100	100
		Rehabilitasi	Menurunnya jumlah angka penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Jumlah wanita Rawansosial ekonomi(WRSE)	Dinas Sosial	100	100
4	Meningkatnya kesalehan sosial Masyarakat dalam	Persentase pendistribusian zakat, infak dan sedekah	Meningkatnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam	Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan kesra	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	penanganan masalah sosial		kehidupan masyarakat				
5	Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	1. Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat. 2. Pemanfaatan Tanah ulayat : a.Potensi ekonomi b.Potensi social	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya :MUI, KAN	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya : - MUI - KAN	Biro Bintal	100	100
		Penyelesaian kasus/sengketa adat yang diselesaikan oleh KAN	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu KAN, LPM,	Dinas PMD	100	100
6	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Meningkatnya Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya		100	100
		Peningkatan event seni dan budaya		Peningkatan event seni dan budaya		100	100
		Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Meningkatnya Pemberdayaan dan Penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat seni dan budaya	Pelestarian permaainan tradisional anak nagari		100	100
			Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik			
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
			Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100
		Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Standar 40 atau 80 PL/orang/ tahun	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	BPSDM	100	100
		Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persayaratan jabatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100
		Perangkat daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70%	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	Pegawai yang mencapai kinerja baik	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100
		Perangkat Daerah Prov menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Bakeuda	100	100
				Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah	Bakeuda	100	100
		Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP)		Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Tingkat Kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat	100	100
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Inspektorat	100	100
		Penggunaan E-Procurement terhadap pengadaan Barang dan Jasa		Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu	Biro AP2BMD		
		Indeks e-Government Provinsi		Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas		
		Keterbukaan Informasi Publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Humas	100	100
		Instansi Pemerintah yang memilki Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B keatas)		Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (EKPPD)		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
		Tertib Arsip		Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarak an Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
4	Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah		Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100
		Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100
		Meningkatnya ketersediaan dan kuaalitas Produk Hukum yang sesuai dengan PeraturanPerund angUndangan		Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
				Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)		Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3: **Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan**							
1	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan	100	100
		Harapan lama sekolah		Harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan	100	100
		Rata-rata lama sekolah		Rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Dinas Pendidikan	100	100
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Dinas Pendidikan	100	100
		APM SD/SDLB/Paket A/MI		APM SD/SDLB/Paket A/MI	Dinas Pendidikan	100	100
		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B	Dinas Pendidikan	100	100
		APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C		APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus SMA		Angka Putus SMA	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus SMK		Angka Putus SMK	Dinas Pendidikan	100	100
4	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	100	100
6	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Balitbang	100	100
Pioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Dinas Kesehatan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kependuduka, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		ASFR 15-19 tahun		ASFR 15-19 tahun	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Klub olah raga	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Persentase peningkatan klub olahraga	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	dalam berolah raga		dalam berolah raga				
4	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Peran pemuda dalam pembangunan (organisasi kepemudaan yang aktif)	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Organisasi kepemudan yang aktif	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100
5	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaa n gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
Prioritas 5 : Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis							
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	Dinas Pangan	100	100
				Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Dinas Pangan	100	100
		Persentase peningkatan produksi : a. Padi b. Jagung c. Cabe d. Daging e. Telur f. Ikan		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Distanhorbun	100	100
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				Persentase Peningkatan Produksi Daging	DPKH	100	100
				Persentase Peningkatan Produksi	DKP	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Perikanan Budidaya			
				Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DKP	100	100
				Penerapan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	DKP	100	100
2	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi TPH	Distanhorbun	100	100
				b. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				c. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Peternakan	DPKH	100	100
				d. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perikanan	DKP	100	100
		b. Persentase Peningkatan Kawasan Agribisnis		a. Persentase Peningkatan kawasan Agribisnis	Distanhorbun DPKH	100	100
				b. Berkembangnya Kawasan Mina Politan	DKP	100	100
				c. Meningkatnya Daerah Sumber Benih Ikan	DKP	100	100
				d. Meningkatnya Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Perikanan Budidaya	DKP	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				e. Meningkatnya usaha dan Investasi kelautan dan Perikanan	DKP	100	100
				f. Persentase Kawasan Terintegrasi dalam melaksanakan Optimalisasi Penyuluhan	Distanhorbun DPKH	100	100
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	a. Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	Distanhorbun	100	100
				b. Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan	Distanhorbun	100	100
				c. Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				d. Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan	DKP	100	100
				e. Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	DPKH	100	100
				f. Peningkatan Kelembagaan Peternakan	DPKH	100	100
				g. Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	DKP	100	100
				h. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH	Distanhortbun	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				i. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Distanhortbun	100	100
				j. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP	100	100
				k. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	Distanhorbun KPKH DKP	100	100
				l. Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan	DKP	100	100
				m. Meningkatnya nilai eksport produk hasil perikanan	DKP	100	100
				n. Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya Hewani	DPKH	100	100
				o. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH	Distanhorbun	100	100
				p. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				q. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	DPKH	100	100
				r. Meningkatnya sarana dan Prasarana UPTD perikanan Budidaya	DKP	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				s. Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan	DKP	100	100
Prioritas 6 : **Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	PMA	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	DPM dan PTSP	100	100
		PMDN		PMDN (juta)	DPM dan PTSP	100	100
				PMA (US$ (ribu)	DPM dan PTSP	100	100
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ratio)	DPM dan PTSP	100	100
				Persentase Perizinan yang Tepat Waktu (%)	DPM dan PTSP	100	100
		Peningkatan Nilai Ekspor	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor (%)	Dinas Perindag	100	100
			Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	Dinas Perindag	100	100
			Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) (%)	Dinas Perindag	100	100
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Dinas Koperasi	100	100
				Persentase Koperasi aktif	Dinas Koperasi	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Pertumbuhan Jumlah Koperasi	Dinas Koperasi	100	100
			Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi sektor riil	Dinas Koperasi	100	100
				Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
				Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
			Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Peningkatan Kemitraan Usaha UKM	Dinas Koperasi	100	100
				Peningkatan Keunggulan Kompetitif UKM terstandarisasi	Dinas Koperasi	100	100
				Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi	100	100
			Peningkatan Kualitas Produk Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	Disperindag	100	100
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi produk industri	Disperindag	100	100
				Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	Disperindag	100	100
			Pengembangan Kewilayah Industri	Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	Disperindag	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Peningkatan klaster yang dibina	Disperindag	100	100
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Nusantara	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
		Mancanegara		Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
			Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang berkembang (destinasi)	Dinas Pariwisata	100	100
			Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100
			Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Peningkatan Nilai Ekspor	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani(IKU)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya laut	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
			Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan		100	100
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disnakertrans	100	100
3	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	DPMD	100	100
Prioritas 9 : **Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**							
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase kemantapan jalan provinsi	Dinas PUPR	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi	Persentase peningkatan Penumpang terangkut Modadarat Modalaut, Udara, ASDP, Kereta Api	Meningkatnya pelayanan `perhubungan transportasi	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	Dinas Perhubungan	100	100
				Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100
				Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut	Dinas Perhubungan	100	100
				Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat	Dinas Perhubungan	100	100
				Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	Dinas Perhubungan	100	100
3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Rasio angka kecelakaan lalu lintas (kematian per 10.000 registrasi kend)	Meningkatnya keselamatan lalu lintas,	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas (Jumlah kematian per 10.000 registrasi kendaraan)	Dinas Perhubungan	100	100
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata Indeks kinerja infrastrukur irigasi provinsi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan Provinsi	Dinas PSDA	100	100
				Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi (Operasional & Pemeliharaan)	Dinas PSDA		

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Persentase Peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan/ peningkatan)	Dinas PSDA	100	100
				Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya rusak air (pembangunan/ peningkatan)	Dinas PSDA		
				Terjaganya fungsi luas kawasan yang terdampakdaya rusak air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)	Dinas PSDA		
				Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)	Dinas PSDA	100	100
		Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan - air minum - Rumah tangga bersanitasi - Penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan air minum	Dinas PUPR	100	100
				Panjang drainase Terbangun	Dinas PSDA	100	100
				Jumlah bangunan strategis terbangun	Dinas PUPR	100	100
				Jumlah rumah Negara terbanguin	Dinas PUPR		
				Jumlah tempat evakuasi sementara terbangun	Dinas PUPR		

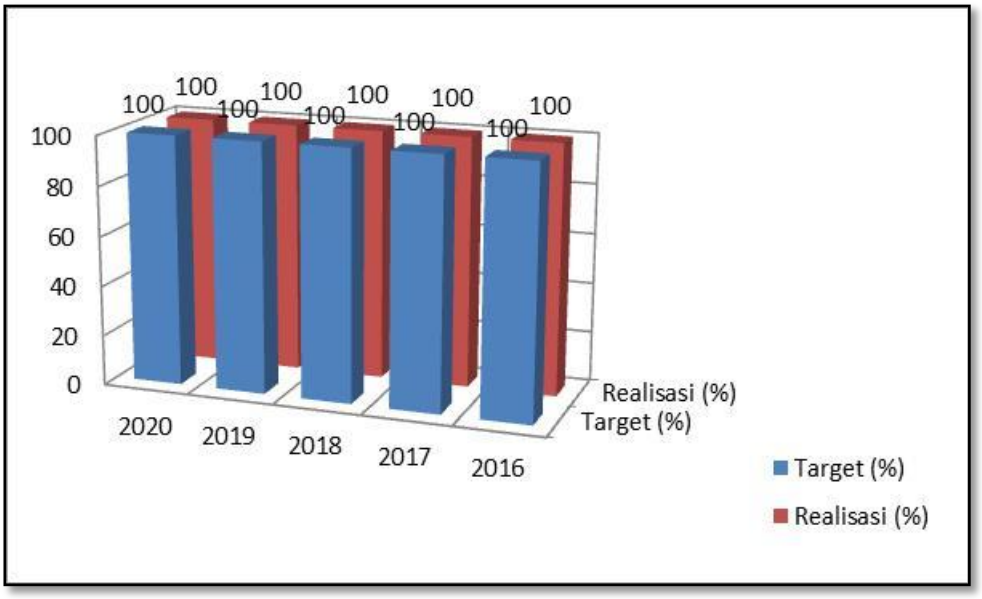
No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun	Dinas PUPR	100	100
				Meningkatnya rumah bersanitasi	Dinas Perkimtan		
				Penurunan luasan kawasan kumuh			
6	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Rasio elektrifikasi	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100
				Terwujudnya pelaksanaan konservasi energi	Dinas ESDM	100	100
				Meningkatnya persentase IUP yang terkelola secara baik dan benar	Dinas ESDM	100	100
				Persentase peningkatan izin pnggunaan air tanah yang sesuai peraturan yang berlaku	Dinas ESDM	100	100
				Peningkatan kualitas perencanaan energy dan sumber daya mineral	Dinas ESDM	100	100
Prioritas 10 : Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam							
1	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	PUPR	100	100
2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Dinas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Dinas Lingkungan hidup	LH	100	100
3	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	LH	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani	Meningkatnya penanganan ilegal loging	Persentase jumlah illegal loging yang tertangani	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)	Meningkatnya penurunan jumlah titik panas	Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)	Dinas Kehutanan	100	100
4	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	BPBD	100	100
5	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana(%)	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana(%)	BPBD	100	100
		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	BPBD	100	100
6	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum	Dinas PSDA	100	100
7	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen

perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD Selama Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan yang diukur melalui indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan tolok ukur Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara RPJMD dengan RKPD tahun 2020 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan target sebesar 100%.

Sementara itu, realisasi indikator kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2020 (%)		Renstra Bappeda (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan**	100	100	100	100
	- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100

d) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman KUA-PPAS sebagai dokumen penganggaran. Semua kegiatan yang terdapat dalam KUA-PPAS harus ada dalam RKPD, artinya sasaran dan indikator yang terdapat dalam KUA-PPAS yang mengacu pada sasaran yang terdapat dalam RKPD. Setelah dilakukan analisa terhadap kedua dokumen tersebut, diketahui bahwa terdapat kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 sebagaimana yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.12
Kesesuaian sasaran dan indikator RKPD dengan KUA PPAS

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 1: Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	Biro Bintal dan Kesra	100	100
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Badan Kesbangpol	100	100
		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Badan KesbangPol	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Konflik sosial	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
4	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Badan Kesbangpol	100	100
		Angka kriminalitas		Angka kriminalitas	Badan Kesbangpol	100	100
5	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam bahaya narkoba	Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam bahaya narkoba	Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Dispora	100	100
6	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba		Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Dinas Satpol PP	100	100
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Kesbangpol	100	100
8	Meningkatnya pengembangan lembaga-lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya: MUI, KAN	Meningkatnya pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya : MUI, KAN	Biro Bintal dan Kesra	100	100
9	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Meningkatnya Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan	100	100
		Peningkatan event seni dan budaya		Peningkatan event seni dan budaya	Dinas Kebudayaan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
10	Meningkatnya Pemberdayaan dan Penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat seni dan budaya	Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Meningkatnya Pemberdayaan dan Penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat seni dan budaya	Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Dinas Kebudayaan	100	100
11	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik	Dinas Kebudayaan	100	100
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	BPSDM	100	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
6	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
7	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100
		SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM		SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100
8	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda	100	100
		Meningkatnya Pendapatan Daerah		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Bakeuda	100	100
		Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas		Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat	100	100
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Inspektorat	100	100
		Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan		Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa	Biro AP2BMD	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		jasa tepat waktu		tepat waktu			
		Indeks e-Government Provinsi		Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas	100	100
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas		Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Humas	100	100
		Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas		Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
		Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan		Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
		Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan		Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100
		Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum		Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum		Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
		Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan		Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3 : **Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan**							
1	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas pendidikan	100	100
		Harapan lama sekolah		Harapan lama sekolah	Dinas pendidikan	100	100
		Rata-rata lama sekolah		Rata-rata lama sekolah	Dinas pendidikan	100	100
2	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Dinas pendidikan	100	100
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Dinas pendidikan	100	100
		APM SD/SDLB/Paket A/MI		APM SD/SDLB/Paket A/MI	Dinas pendidikan	100	100
		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B	Dinas pendidikan	100	100
		APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C		APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	Dinas pendidikan	100	100
		Angka Tidak Melanjutkan		Angka Tidak Melanjutkan dari	Dinas pendidikan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		dari SMP ke Sekolah Menengah		SMP ke Sekolah Menengah			
		Angka Putus SMA		Angka Putus SMA	Dinas pendidikan	100	100
		Angka Putus SMK		Angka Putus SMK	Dinas pendidikan	100	100
4	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Dinas pendidikan	100	100
		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	Dinas pendidikan	100	100
5	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	100
6	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Balitbang	100	100
Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		ASFR 15-19 tahun		ASFR 15-19 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Persentase peningkatan klub olahraga	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Persentase peningkatan klub olahraga	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100
4	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan	Organisasi kepemudan yang aktif	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam	Organisasi kepemudan yang aktif	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	pemuda dalam pembangunan		pembangunan				
5	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
Prioritas 5 : Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis							
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	Dinas Pangan	100	100
		Ketersediaan Pangan Utama (beras)		Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Dinas Pangan	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Daging		Persentase Peningkatan Produksi Daging	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Penerapan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan		Penerapan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
2	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisni	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi TPH	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisni	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi TPH	Distanhorbun	100	100
		b. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan		b. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		c. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Peternakan		c. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Peternakan	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	100	100
		d.Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perikanan		d.Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perikanan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Persentase Peningkatan kawasan Agribisnis		Persentase Peningkatan kawasan Agribisnis	Distanhorbun DPKH DKP	100	100
		Berkembangnya Kawasan Mina Politan		Berkembangnya Kawasan Mina Politan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya Daerah Sumber Benih Ikan		Meningkatnya Daerah Sumber Benih Ikan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Perikanan Budidaya		Meningkatnya Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya usaha dan Investasi kelautan dan Perinnanan		Meningkatnya usaha dan Investasi kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Persentase Kawasan Terintegrasi dalam melaksanakan Optimalisasi Penyuluhan		Persentase Kawasan Terintegrasi dalam melaksanakan Optimalisasi Penyuluhan	Distanhorbun DPKH	100	100
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan		Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan		Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	DPKH	100	100
		Peningkatan Kelembagaan Peternakan		Peningkatan Kelembagaan Peternakan	DPKH	100	100
		Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH	Distanhorbun	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	Distanhorbun	100	100
		Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan		Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Meningkatnya nilai eksport produk hasil perikanan		Meningkatnya nilai eksport produk hasil perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya Hewani		Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya Hewani	DPKH	100	100
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	DPKH	100	100
		Meningkatnya sarana dan Prasarana		Meningkatnya sarana dan Prasarana UPTD	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		UPTD perikanan Budidaya		perikanan Budidaya			
		Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan		Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 6 : **Pengembangan Dinas Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**							
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	DPM dan PTSP	100	100
		PMDN (juta)		PMDN (juta)	DPM dan PTSP	100	100
		PMA (US$ (ribu)		PMA (US$ (ribu)	DPM dan PTSP	100	100
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	ndeks Kepuasan Masyarakat (Ratio)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	ndeks Kepuasan Masyarakat (Ratio)	DPM dan PTSP	100	100
		Persentase Perizinan yang Tepat Waktu (%)		Persentase Perizinan yang Tepat Waktu (%)	DPM dan PTSP	100	100
3	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor (%)	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor (%)	Dinas Perindag	100	100
4	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	Dinas Perindag	100	100
5	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) (%)	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) (%)	Dinas Perindag	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
6	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Dinas Koperasi	100	100
		Persentase Koperasi aktif		Persentase Koperasi aktif	Dinas Koperasi	100	100
		Pertumbuhan Jumlah Koperasi		Pertumbuhan Jumlah Koperasi	Dinas Koperasi	100	100
7	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi sektor riil	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi sektor riil	Dinas Koperasi	100	100
		Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi		Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
		Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi		Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
8	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Peningkatan Kemitraan Usaha UKM	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Peningkatan Kemitraan Usaha UKM	Dinas Koperasi	100	100
		Peningkatan Keunggulan Kompetitif UKM terstandarisasi		Peningkatan Keunggulan Kompetitif UKM terstandarisasi	Dinas Koperasi	100	100
		Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah		Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi	100	100
9	Peningkatan Kualitas Produk Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	Peningkatan Kualitas Produk Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	Dinas Perindag	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
10	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi produk industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi produk industri	Dinas Koperasi	100	100
		Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan		Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	Dinas Koperasi	100	100
11	Pengembangan Kewilayah Industri	Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	Pengembangan Kewilayah Industri	Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	Dinas Perindag	100	100
		Peningkatan klaster yang dibina		Peningkatan klaster yang dibina	Dinas Perindag	100	100
12	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
		Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
13	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang berkembang (destinasi)	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang berkembang (destinasi)	Dinas Pariwisata	100	100
14	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya (orang)	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100
		Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya (orang)		Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
15	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (pelaku)	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
		Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK (pelaku)		Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : **Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**							
1	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Produksi perairan umum		Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
4	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan		Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	DPMD	100	100
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disnakertrans	100	100
3	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	DPMD	100	100
Prioritas 9 : **Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**							
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	Dinas Perhubungan	100	100
		Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut		Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut	Dinas Perhubungan	100	100
		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat	Dinas Perhubungan	100	100
		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	Dinas Perhubungan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas,	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya keselamatan lalu lintas,	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi	Dinas PSDA	100	100
		Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi (Operasional &Pemeliharaan)		Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi (Operasional &Pemeliharaan)	Dinas PSDA	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan /peningkatan)		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan/peningkatan)	Dinas PSDA	100	100
		Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)		Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi)	Dinas PSDA	100	100
		Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya rusak air (pembangunan/ peningkatan)		Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya rusak air (pembangunan/ peningkatan)	Dinas PSDA	100	100
		Terjaganya fungsi luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air		Terjaganya fungsi luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Operasional/Pem	Dinas PSDA	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		(Operasional/Pemeliharaan/Rehabilitasi)		eliharaan/ Rehabilitasi)			
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase rumah tangga bersanitasi	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase rumah tangga bersanitasi	Dinas PUPR	100	100
		Persentase cakupan pelayanan air minum		Persentase cakupan pelayanan air minum	Dinas PUPR	100	100
		Penurunan luasan kawasan kumuh		Penurunan luasan kawasan kumuh	Dinas Perkimtan	100	100
6	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100
Prioritas 10 : Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam							
1	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian rencaaa pembangunan dan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan hidup	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya kualitas udara Ambien	Persentase meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Dinas LH	100	100

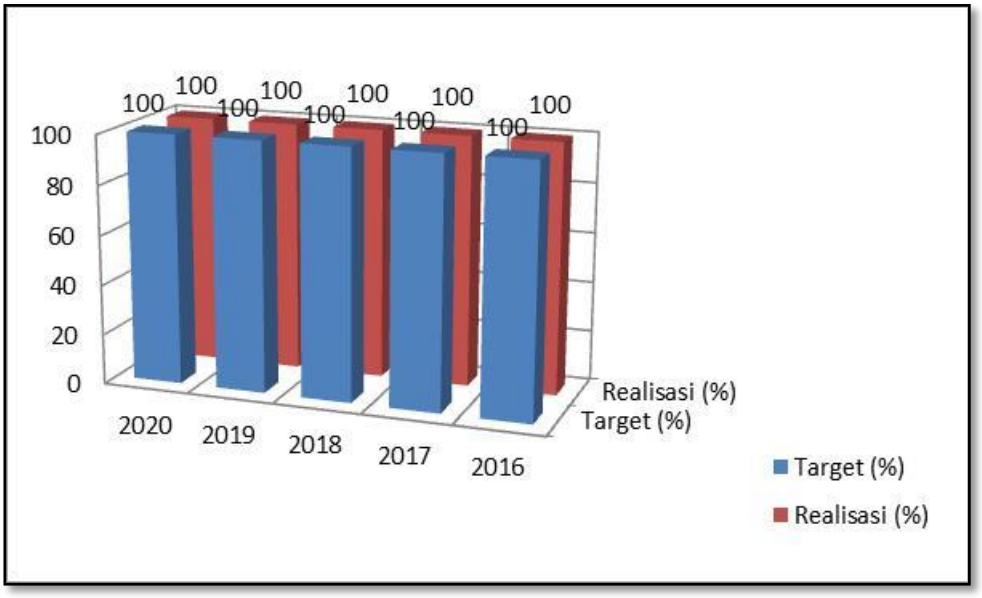
No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Meningkatnya penataan lingkungan hidup	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas LH	100	100
			Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Dinas LH	100	100
			Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya penilaian terhadap peserta/objek PROPER	Persentse Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya peran serta masyarakat/ lembaga dalam pengelolaan sampah	Persentase lembaga /bank sampah	Dinas LH	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
3	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)	Dinas Kehutanan	100	100
			Terwujudnya kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta pengunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya	Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fingsinya	Dinas Kehutanan	100	100
				Pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu	Dinas Kehutanan	100	100
				Persenstase peningkatan PNPB	Dinas Kehutanan	100	100
4	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	BPBD	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
5	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana (%)	Meningkatnya sistem peringatan dini bencana	Persentase peningkatan sistem peringatan dini bencana	BPBD	100	100
		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulang an bencana (%)	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulang an bencana (%)	BPBD	100	100
			Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana (%)	BPBD	100	100
6	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum	Meningkatnya tampungan sumbet -sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
			Meningkatnya kinerja infrastruktur irigasi	Indek kinerja infrastruktur irigasi	Dinas PSDA	100	100
			Berkurangnya dampak daya rusak air	Persentase pengutangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
7	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Kelautan Perikanan	100	100

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS Selama Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan yang diukur melalui indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan tolok ukur Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS tahun 2020 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan target sebesar 100%.

Sementara itu, realisasi indikator kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2020 (%)		Renstra Bappeda (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan**	100	100	100	100
	- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	100	100	100	100

Secara resmi indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan tidak ada standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, namun memang seharusnya konsistensi antar dokumen perencanaan mencapai 100%, karena keberhasilan sebuah

perencanaan bermula dengan adanya kesesuaian antar dokumen perencanaan yang dihasilkan. Dalam hal ini, komponen sasaran indikator kinerja dan program yang terdapat pada RPJMD, harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Terdapatnya konsistensi sasaran indikator kinerja antar dokumen yang ditetapkan telah sesuai dengan yang kita targetkan sehingga dokumen perencanaan sudah dapat dikatakan berkualitas. Konsistensi tersebut dapat terwujud karena beberapa **faktor pendorong**, yaitu :

1. Adanya kepatuhan dan komitmen semua OPD yang terlibat. Sebagaimana komitmen dalam melaksanakan e-planning untuk proses penyusunan perencanaan yang sudah menjadi keharusan serta sudah diintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran sehingga kosistensi tetap terjaga.
2. Ketersediaan Fungsional Perencana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendampingi penyusunan dokumen perencanaan.
3. Disamping itu, dalam rapat pembahasan perencanaan mulai dari pembahasan renja, forum SKPD dan musrenbang, konsistensi tetap dikawal oleh Bappeda melalui bidang terkait. Begitu juga pada proses penganggaran, mulai dari pembahasan RKA sampai pembahasan DPA konsistensi dokumen yang telah ditetapkan akan menjadi acuan dalam pembahasan dimaksud.

Aksi yang Telah dilakukan

- Melakukan pendampingan bagi OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan (verifikasi Renja, Evaluasi Capaian target Renstra dan Renja OPD);
- Penguatan Koordinasi Internal Bappeda dalam melakukan pendampingan bagi OPD;
- Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM di Bappeda melalui Bimtek;
- Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas Sakato Plan

Analisis Pencapain Kinerja

Analisis pencapaian kinerja adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan bagaimana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Analisis ini dibagi dua yaitu analisis penggunaan sumberdaya dan analisis program /kegiatan penunjang pencapaian kinerja :

1. Analisis efesiensi penggunaan sumberdaya

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi elektronik (e-planning), Bappeda Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pengembangan dan pembaharuan terhadap aplikasi ini. Dengan demikan didapat efisiensi penggunaan sumber daya, seperti sumber daya manusia, waktu, dan juga mencapai ketepatan, efisiensi dan efektifitas penyusunan rencana karena sudah berbasis sistem informasi teknologi.

Disamping itu untuk sebagai media publikasi elektronik, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyediakan situs web yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan efiensi penggunaan sumberdaya terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dalam dokumen perencanaan.

2. Analisis Program /kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target kinerja pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai target yaitu konsistensi dan kesesuaian antar dokumen perencanaan dilakukan upaya antara lain :

a. Menyediakan anggaran yang menunjang pencapaian target kinerja yaitu melalui rapat-rapat koordinasi secara berkala baik dengan kabupaten kota maupun lingkup OPD provinsi dan kementerian terkait.

b. Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2020 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan adalah sebesar Rp. 7.041.767.359,- dan terealisasi Rp. 6.847.429.065,- atau 97,24%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 194.338.294,- atau sebesar 2,76%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :
   - Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
   - Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan.

   Anggaran tersebut tersebar pada 3 program yaitu :
   - Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 8 kegiatan
   - Program Pembangunan Data dan Informasi Pembangunan dengan 3 kegiatan
   - Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 29 kegiatan

c. Menyempurnakan aplikasi e-Planning untuk menjaga konsistensi perencanaan sampai kepada penganggaran. Disamping itu menetapkan SK operator aplikasi Simlaras untuk memproses usulan DAK sebagai upaya mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dari pusat sampai daerah.

Sasaran Strategis 2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Tata kelola organisasi yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara internal maupun secara ekternal. Untuk melihat keberhasilan tata kelola organisasi tersebut maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatkan tata kelola organisasi. Gambaran pencapaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebelumnya yang diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai dan capaian pada tahun 2020 sebagai berikut:

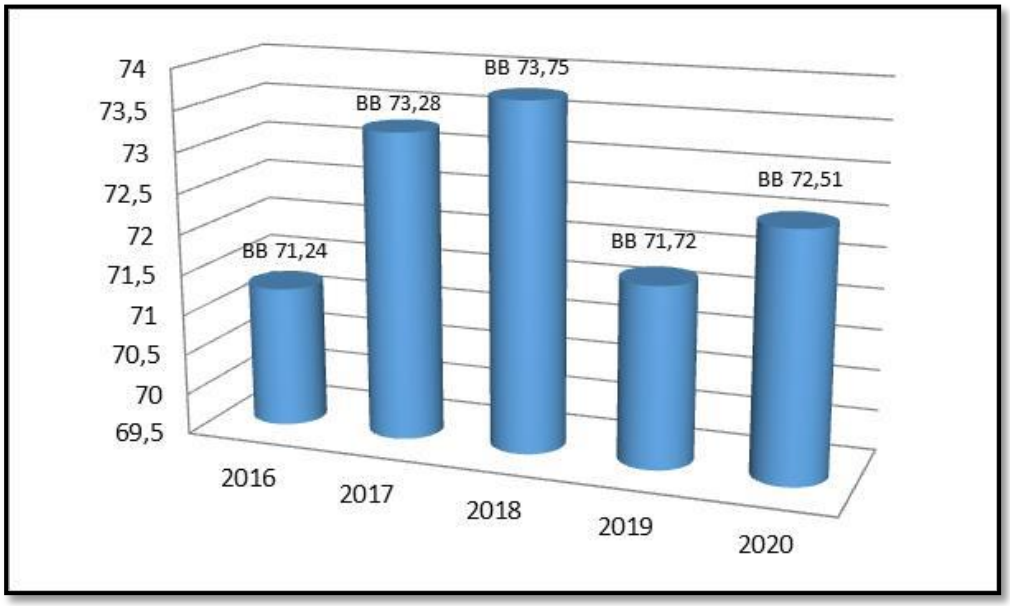
Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Dua
Tahun 2020

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi						
Indikator Kinerja Sasaran	**Cara Penghitungan**	**Satuan**	**Target Kinerja**	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Predikat**
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Lakip Bappeda (hasil evaluasi atas implementasi Sakip pada Bappeda Prov. Sumbar Tahun n-1)	Nilai	BB	BB (72,51)	100	Sangat tinggi

Sumber : Bappeda Prov. Sumbar

Dari tabel tersebut diatas diketahui pencapaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja capaiannya adalah 100% dari target yang ditetapkan adalah BB realisasinya juga BB dengan nilai 72,51. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal walaupun belum begitu optimal. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2016-2020
Bappeda Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Hasil Penilaian Lakip Bappeda Prov. Sumbar

Dari grafik diatas dapat dilihat perkembangan hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2016 sampai 2020. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memperoleh nilai tertinggi adalah pada tahun 2018 (penilaian terhadap kinerja tahun 2017) yaitu dengan nilai 73,75 dan pada tahun 2019 (penilaian terhadap kinerja tahun 2018) mengalami penurunan menjadi 71,72. Selanjutnya dengan upaya perbaikan yang dilakukan terhadap penerapan akuntabilitas kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka pada tahun 2020 (terhadap penilaian kinerja tahun 2019), nilai akuntabilitas kinerja kembali membaik dengan nilai 72,51 kategori BB.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola organisasi yang diukur melalui indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
   a. Komitmen Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

b. Adanya pembinaan dan arahan dari tim terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yaitu Biro Organisasi dan Inspektorat.

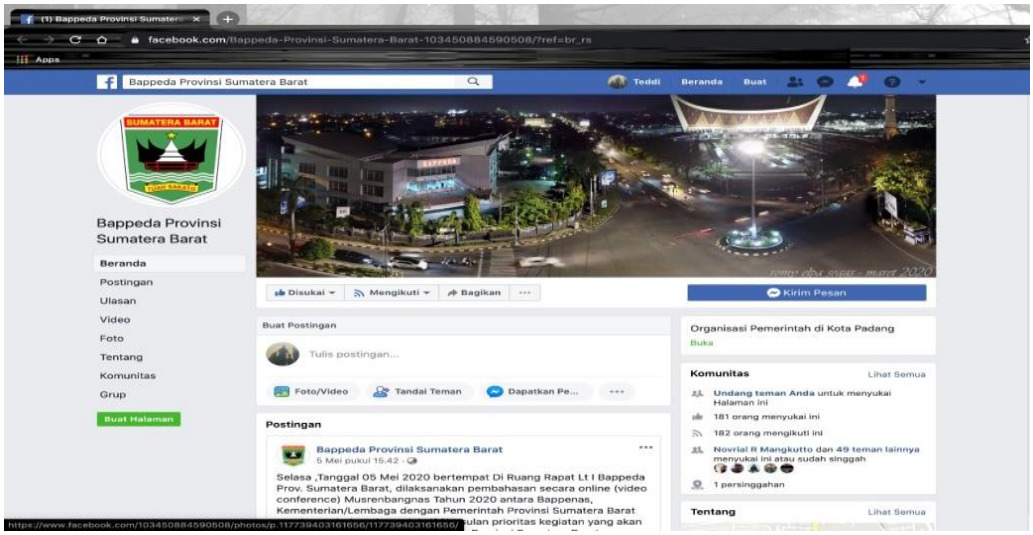
2. Faktor Penghambat

Masih belum diterapkannya pemberian penghargaan/reward dan hukuman/pusnishment dalam penilaian kinerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat tentang pemberian penghargaan/reward dan hukuman/pusnishment dalam penilaian kinerja. Saat ini pemberian reward atas capaian kinerja individu masih diberikan dalam bentuk perjalanan dinas, sedangkan punishmen diberikan dalam bentuk teguran langsung oleh atasan yang bersangkutan.

3. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi melalui aksi perubahan terhadap pelaksanaan Reformasi Biroksi di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut, antara lain :

Area Perbaikan yang sudah dilakukan

1) Area Ketatalaksanaan
   1. Peta proses bisnis telah dijabarkan dalam bentuk SOP
   2. Prosedur operasional (SOP) telah diterapkan
   3. Informasi publik terkait kinerja Bappeda telah dapat diakses melalui website dan Facebook Bappeda



2) Area Manajemen Perubahan
   1. Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkup Bappeda Prov. Sumbar melalui SK Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor : 020/29/I/SK/Set/Bappeda-2020.
   2. Rencana Kerja telah selaras dengan Roadmap

3. Rencana Kerja telah di monitoring dan di evaluasi melalui rapat evaluasi
4. Telah dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bappeda Prov. Sumbar melalui SK Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor : 820/25/IV/Set/Bappeda-2020

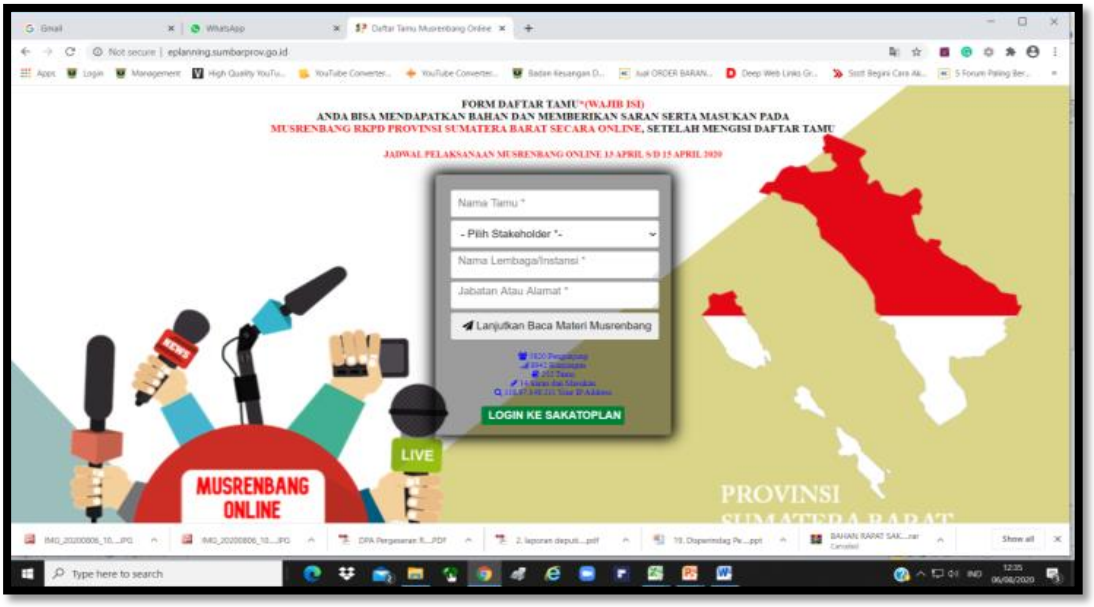
3) Area Penataan dan Penguatan Organisasi
1. Telah dilakukan review terhadap Anjab dan ABK Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.
2. Telah disusun SOTK baru sesuai kebutuhan kinerja organisasi.
3. Telah disusun konsep standar kompetensi teknis jabatan Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.
4. Telah disusun database kebutuhan diklat kompetensi bagi pegawai di Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.

4) Area Sumber Daya Manusia
1. SKP Tahun 2020 telah dibuat secara berjenjang dan selaras dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah dibuat dan telah dilakukan evaluasi.
3. Telah disusun database kebutuhan diklat kompetensi bagi pegawai di Lingkup Bappeda Prov. Sumbar.

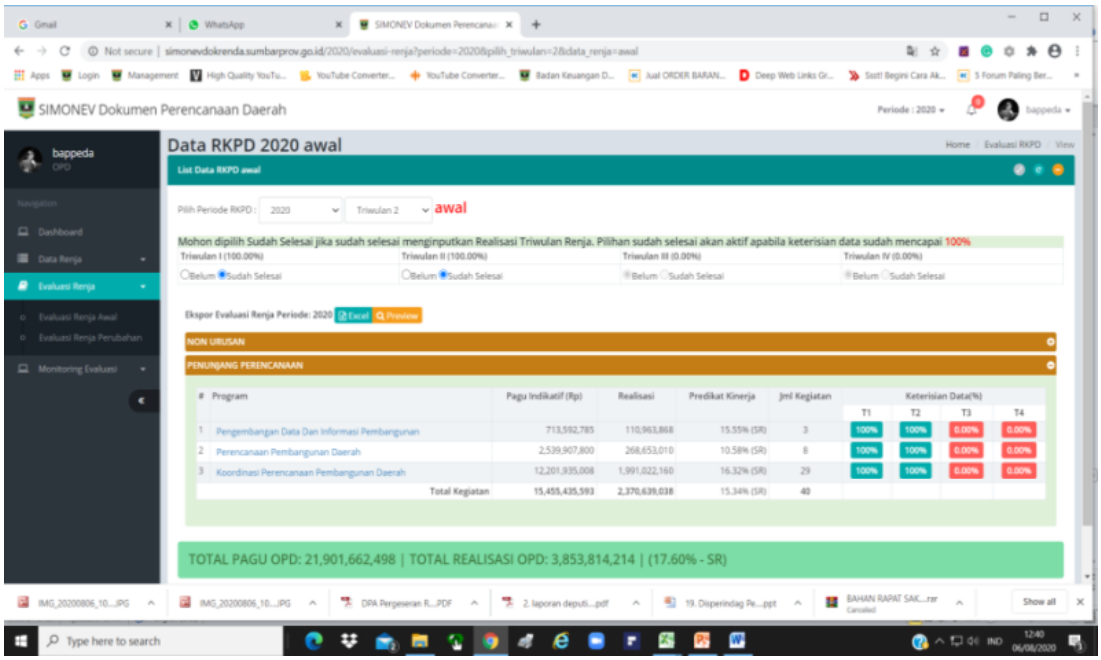
5) Area Kuntabilitas
1. Pimpinan sudah terlibat langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.
2. Pimpinan sudah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
3. Perjanjian Kinerja secara berjenjang dan selaras mulai dari Esselon II, III, IV dan Staf telah dibuat.
4. Indikator Kinerja Individu telah dibuat dan disesuaikan dengan PK dan SKP.
5. Rencana Aksi telah dibuat dan dievaluasi secara berkala.

6) Area Pengawasan
1. Telah dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Bappeda Prov. Sumbar dengan SK Kepala Bappeda Prov. Sumbar No. 821/32/I/Set/Bappeda-2020.
2. Telah dilakukan Public campaign melalui spanduk dan pamlet.
3. Telah dilakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dilingkungan Bappeda Prov. Sumbar.
4. Telah disusun Pedoman Penanganan Whistleblowing pada Bappeda Prov. Sumbar melalui SK Kepala Bappeda No. 020/30/I/SK/Set/Bappeda-2020.

7) Pelayanan Publik
1. Melakukan pengembangan Aplikasi Sakato Plan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.
2. Melakukan pengembangan Aplikasi SIMONEV DOKRENDA sebagai media dalam melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja.
3. Pengelolaan SDP2D Sistem Database Perencanaan.



Pengembangan Sakato Plan



Pengembangan Simonev Dokrenda

Area Perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2021

Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2021

1. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui perbaikan cascading kinerja secara berjenjang.
2. Menggunakan aplikasi e-kinerja dalam pengukuran capaian data kinerja secara berjenjang.

Analisis Pencapain Kinerja

Analisis pencapaian kinerja adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Analisis pencapaian kinerja dapat dibagi dua yaitu analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja :

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

   Dalam upaya untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan tepat waktu maka diperlukan sumberdaya manusia yang cukup dan memadai sesuai dengan peranaannya masing-masing, namun tenaga yang tersedia masih relatif kurang untuk pengelola terutama di bagian keuangan dan bidang-bidang sebagai pembantu pengelolaan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memfungsikan tenaga adminitrasi lainnya yang ditugasi untuk mengelola keuangan. Untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola keuangan dilakukan dengan mengirim aparatur untuk mengikuti diklat yang dibiayai oleh instansi lain, dengan demikian dapat lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai keberhasilan target kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih dilakukan melalui beberapa upaya yaitu :

a. Menganggarkan untuk peyediaan sarana dan prasarana pendukung kerja seperti Komputer PC dan Laptop, penyediaan sarana ruangan rapat dan prasarana pelayanan dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan.

b. Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2020 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola organisasi adalah sebesar Rp. 4.133.868.522,- dan terealisasi Rp. 4.075.184.164,80,- atau 98,58%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 58.684.357,20,- atau sebesar 1,42%.

c. Mengirimkan peserta untuk Diklat Perencana maupun diklat keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga lainnya seperti Bappenas, Kemendagri Unand maupun lembaga lainnya.

3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas Bappeda untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis, memerlukan dukungan Anggaran melalui Belanja Langsung yang memadai. Pada tahun 2020, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.175.635.881,- yang direalisasikan sebesar Rp. 10.922.613.229,80,- atau sebesar 97,74%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 253.022.651,20,- (2,26%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
2. Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan.

Jika dibandingkan dengan hasil kinerja yang sudah dicapai dengan penggunaan anggaran, maka sudah terjadi efektivitas penggunaan anggaran. Dimana sasaran strategis Bappeda untuk 2 indikator sasaran telah mencapai 100%, dan diimbangi dengan capaian realisasi anggaran untuk sasaran 1 sebesar 97,24% dan sasaran strategis 2 dengan realiasi anggaran sebesar 98,58%. Potret tingkat efketivitas anggaran tersebut sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dengan capaian 100%	Total Anggaran untuk Sasaran I	7.041.767.359,00	6.847.429.065,00	97,24
		1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.278.368.923,00	1.257.928.047,00	98,40
		2. Program Pembangunan Data dan Informasi Pembangunan	210.624.628,00	205.560.003,00	97,60
		3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.552.773.808,00	5.383.941.015,00	96,96
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi, dengan capaian 100%	Total Anggaran untuk Sasaran II	4.133.868.522,00	4.075.184.164,80	98,58
		1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.027.134.125,00	2.976.925.768,80	98,34
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	636.951.314,00	634.512.689,00	99,62
		3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	67.500.000,00	67.498.200,00	100,00
		4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.220.000,00	1.125.000,00	92,21
		5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	401.063.083,00	395.122.507,00	98,52
	Jumlah		**11.175.635.881,00**	**10.922.613.229,80**	**97,74**

Secara rinci realisasi anggaran per program dan kegiatan APBD Tahun 2020 yang mendukung capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan Tahun 2020

No.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
	BELANJA LANGSUNG	**11.175.635.881**	**10.922.613.229,80**	**97,74**
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**3.027.134.125**	**2.976.925.768,80**	**98,34**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.980.000	39.980.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	919.000.000	893.081.646,00	97,18
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	69.295.000	69.011.327,00	99,59
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	902.370.000	883.791.766,80	97,94
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.681.583	48.669.796,00	99,98
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.951.284	35.891.034,00	99,83
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.930.545	5.924.145,00	99,89
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	32.040.000	32.004.000,00	99,89
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	49.952.000,00	99,90
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	820.140.753	815.498.694,00	99,43
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	103.744.960	103.121.360,00	99,40
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**636.951.314**	**634.512.689,00**	**99,62**
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.563.750	112.534.323,00	99,97
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	180.000.000	179.905.580,00	99,95
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	83.102.364	81.474.886,00	98,04
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	32.500.000	32.415.000,00	99,74
16	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	19.885.200	19.769.000,00	99,42
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	13.000.000	12.995.400,00	99,96
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	30.000.000	29.918.500,00	99,73
19	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	165.900.000	165.500.000,00	99,76
III	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**67.500.000**	**67.498.200,00**	**100,00**
20	Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	67.500.000	67.498.200,00	100,00
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**1.220.000**	**1.125.000,00**	**92,21**
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.220.000	1.125.000,00	92,21

No.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
V	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**401.063.083**	**395.122.507,00**	**98,52**
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.444.050	62.910.577,00	96,13
23	Penatausahaan Keuangan SKPD	254.000.000	252.050.000,00	99,23
24	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	38.659.033	37.201.930,00	96,23
25	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian AsetSKPD	42.960.000	42.960.000,00	100,00
VI	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.278.368.923**	**1.257.928.047,00**	**98,40**
26	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.926.600	19.520.661,00	97,96
27	Penyusunan KUA/PPAS APBD	209.096.600	209.074.483,00	99,99
28	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	571.325.274	559.080.501,00	97,86
29	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	17.629.749	16.381.532,00	92,92
30	Penyusunan RKPD	283.522.450	282.689.386,00	99,71
31	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi perencanaan Pembangunan Daerah	31.000.000	31.000.000,00	100,00
32	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	4.788.800	4.699.050,00	98,13
33	Penyusunan Rancangan Teknikratik RPJMD Prov Sumbar 2021-2026	141.079.450	135.482.434,00	96,03
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN**	**210.624.628**	**205.560.003,00**	**97,60**
34	Pengelolaan Website www.bappeda.sumbarprov.go.id	49.960.000	49.583.127,00	99,25
35	Pengelolaan data dan informasi spasial berbasiskan GIS untuk Perencanaan pembangunan	8.188.400	8.180.805,00	99,91
36	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	152.476.228	147.796.071,00	96,93
VIII	**PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.552.773.808**	**5.383.941.015,00**	**96,96**
37	Kerja Sama Ekonomi Regional dan Internasional	374.116.579	359.936.149,00	96,21
38	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	18.315.126	16.916.337,00	92,36
39	Harmonisasi Program / Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	42.975.917	27.543.863,00	64,09
40	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	2.336.283.000	2.318.879.526,00	99,26
41	Harmonisasi Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	20.314.282	20.314.282,00	100,00
42	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	77.744.830	68.715.161,00	88,39
43	Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP 39/2006	14.298.400	14.198.866,00	99,30
44	Harmonisasi Perencanaan dan Kerja Sama Pembangunan Bidang Ekonomi	170.646.701	170.634.991,00	99,99
45	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	126.562.528	125.426.508,00	99,10
46	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	25.801.721	25.288.161,00	98,01
47	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	14.629.450	14.580.938,00	99,67
48	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	128.535.600	127.188.203,00	98,95

No.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
49	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15.350.956	15.346.995,00	99,97
50	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	142.712.450	141.770.945,00	99,34
51	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	41.183.200	36.507.790,00	88,65
52	Akselerasi dan sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	13.334.400	13.004.555,00	97,53
53	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	512.508.200	503.263.238,00	98,20
54	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	54.635.950	54.301.706,00	99,39
55	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintah dan Aparatur	54.090.368	53.418.413,00	98,76
56	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	40.556.500	40.480.141,00	99,81
57	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	45.772.000	45.513.750,00	99,44
58	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	51.013.926	48.603.264,00	95,27
59	Harmonisasi Program / Kegiatan Pangan dan Gizi	43.631.451	41.311.985,00	94,68
60	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota	341.428.756	335.877.198,00	98,37
61	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatra barat	232.188.294	231.293.688,00	99,61
62	Pelaksanaan rakortek Pembangunan Daerah	76.206.805	76.146.433,00	99,92
63	Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	1.944.261	1.944.261,00	100,00
64	Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025	172.943.257	101.497.467,00	58,69
65	Tata Kelola Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah	363.048.900	354.036.201,00	97,52

Secara umum serapan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2020 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Bappeda dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari 65 kegiatan yang tergabung dalam urusan wajib perencanaan pembangunan, hanya terdapat 4 kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%. Kegiatan tersebut adalah :

1. Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jumlah anggaran Rp 42.975.917,00 terealisasi sebesar Rp 27.543.863,00 atau 64,09 %. Hal ini karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tidak terlaksana secara maksimal, dimana dari jumlah peserta yang diminta yaitu OPD provinsi dan kabupaten kota hanya 5 % yang menyanggupi dan mengirimkan nama usulan.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; jumlah anggaran Rp 42.975.917,00 terealisasi sebesar Rp 27.543.863. Karena adanya pandemi Covid 19, penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020 sedikit mengalami kendala sehingga waktu pelaksanaan penyusunan buku EKPD kurang dari lima bulan. Sesuai ketentuan

pembayaran belanja jasa tenaga ahli sebagai tim penulis adalah 80 % dari standar harga yang berlaku. Terdapat sisa anggaran pada rekening belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.

3. Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman; jumlah anggran Rp 41.183.200,00 terealisasi sebesar Rp 36.507.790,00 atau 88,65 %. Sisa anggaran adalah belanja perjalanan dinas yang memang tidak bisa dimanfaatkan.
4. Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; jumlah anggaran Rp 172.943.257,00, terealisasi sebesar Rp 101.497.467,00 atau 58,69 %. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan jadwal yang diberikan oleh DPRD. Jadwal semula Revisi RPJPD akan ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2020 namun kemudian diputuskan bahwa Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2025 tidak ditetapkan di tahun 2020, sehingga sisa anggaran adalah pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja cetak.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2020. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2020 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Beberapa catatan rekomendasi dari Hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2019 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2020, terutama dalam point Rencana Aksi. Pada tahun 2020, telah dilakukan perbaikan terhadap Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kinerja Bappeda pada Rencana Aksi agar lebih spesifik serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian rencana aksi secara poriodik.
2. Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, dengan indikator Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan, realisasi kinerja Bappeda adalah sebesar 100%.
3. Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, realisasi kinerja Bappeda mencapai 100%. Dimana, pada tahun 2020 berdasarkan kinerja tahun 2019 nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target BB dan terealisasi BB dengan nilai 72,51 dan capaian kinerja 100%.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas Bappeda untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.175.635.881,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.922.613.229,80,- atau sebesar 97,74%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 253.022.651,20,- (2,26%).

4.2 REKOMENDASI

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan adalah :

1. Penyempurnaan Cascading Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas.
2. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level eselon 3 dan eselon 4 bisa terus ditingkatkan.

Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2020

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**HANSASTRI, SE,Ak,MM,CFrA**
Jabatan	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	**IRWAN PRAYITNO**
Jabatan	:	Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
IRWAN PRAYITNO	**HANSASTRI, SE,Ak,MM,CFrA**
	NIP. 19641013 199103 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN : 2020

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	1.1	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan	100%
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	2.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	3.027.134.125	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	636.951.314	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	67.500.000	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp	1.220.000	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp	401.063.083	APBD
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.278.368.923	APBD
7.	Program Pembangunan Data dan Informasi Pembangunan	Rp	210.624.628	APBD
8	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	5.552.773.808	APBD
	JUMLAH	Rp	11.175.635.881	

Padang, November 2020

Gubernur Sumatera Barat

IRWAN PRAYITNO

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

HANSASTRI, SE,Ak,MM,CFrA
NIP.19641013 199103 1 001

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2020
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :								Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan					**210.624.628**	**205.560.003**
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	Tw I	-	-		- Melaksanakan forum data perencanaan pembangunan.	Belum ditemui kendala yang berarti	Optimalisasi Koordinasi dan Aplikasi		Pengelolaan Website www.bappeda.sumbarprov.go.id	Update berita pada website Bappeda Sumbarprov.go.id	12 bulan	12 bulan	49.960.000	49.583.127
			Tw II	-	-		- Evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dan RPJMD.				Pengelolaan Data Dan Informasi Spasial Berbasiskan GIS Untuk Perencanaan Pembangunan	Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat	1 laporan	1 laporan	8.188.400	8.180.805
			Tw III	100%	100%	100%	- Evaluasi terhadap indikator dan capaian indikator kinerja Renstra dan RPJMD. - Konsinyir penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 untuk menyamakan persepsi dalam merumuskan permasalahan, isu strategis, strategi, kebijakan dan indikator kinerja sebagai pedoman bagi daerah kab/kota dan bagi SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan 5 tahun.				Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	- Terlaksananya Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. - Terupdatenya Sistem Database Pembangunan Daerah (www.edatabasesumbarprov.go.id).	2 kali 1 aplikasi	2 kali 1 aplikasi	152.476.228	147.796.071
			Tw IV	100%	100%	100%										
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	Tw I	-	-		- Verifikasi Renja OPD - Evaluasi Renja OPD	Belum ditemui kendala yang berarti	- Optimalisasi Koordinasi dan Aplikasi	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**1.278.368.923**	**1.257.928.047**
			Tw II	100%	100%	100%			- Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas Sakato Plan		Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020	1 dokumen, 10 buku laporan	1 dokumen, 10 buku laporan	19.926.600	19.520.661

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
			Tw III	100%	100%	100%			- Akan dilaksanakan Bimtek Penajaman indikator program dan kegiatan untuk Renstra dan Renja pada Bulan November 2020.		Penyusunan KUA/PPAS APBD	Tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2021 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020	2 Dokumen, 1385 buku	2 Dokumen, 1385 buku	209.096.600	209.074.483
			Tw IV	100%	100%	100%					Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7 modul	7 modul	571.325.274	559.080.501
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	Tw I	-	-		- Pengendalian dan Evaluasi RKPD. - Fasilitasi RKPD Kab/Kota	Belum ditemui kendala yang berarti	- Optimalisasi Koordinasi dan Aplikasi. - Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas Sakato Plan.		Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta(Public Private Partnership Book)	20 buku	20 buku	17.629.749	16.381.532
			Tw II	100%	100%	100%					Penyusunan RKPD	Buku RKPD Tahun 2021 dan RKPD Perubahan 2020	2 Dokumen, 380 eksemplar	2 Dokumen, 380 eksemplar	283.522.450	282.689.386
			Tw III	100%	100%	100%	- Melaksanakan Bimtek SIPD dalam rangka menyamakan persepsi dalam merumuskan dokumen perencanaan dalam SIPD.				Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdistribusikan ke kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	31.000.000	31.000.000
			Tw IV	100%	100%	100%					Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	Jumlah Aparatur Fungsional perencana yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pertemuan, Sosialisasi, Workshop, Seminar dan even nasional	3 Orang	3 Orang	4.788.800	4.699.050
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	Tw I	-	-		Verifikasi Rancangan KUA	Belum ditemui kendala yang berarti	- Optimalisasi Koordinasi dan Aplikasi. - Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas Sakato Plan.		Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Tersedianya Rancangan Teknotratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	141.079.450	135.482.434
			Tw II	-	-					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah					**5.552.773.808**	**5.403.941.015**
			Tw III	100%	100%	100%					Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	- Laporan kerjasama ekonomi regional dan internasional	1 Dokumen (5 buku)	1 Dokumen (5 buku)	374.116.579	359.936.149
			Tw IV	100%	100%	100%						- Mengikuti Rakorgub Se-Sumatera	1 kali	1 kali		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
												- Mengikuti Rapat Teknis Rakorgub se Wilayah Sumatera - Mengikuti kegiatan IMT-GT - Mengikutin kegiatan kerjasama dengan luar negeri	1 kali 2 Negara 8 Kementerian	1 kali 2 Negara 8 Kementerian		
											Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	Terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat	1 laporan SDGs	1 laporan SDGs	18.315.126	16.916.337
											Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	42.975.917	27.543.863
											Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Perencanaan dan Implementasi program IPDMIP yang terkoordinasi	1 dokumen	1 dokumen	2.336.283.000	2.318.879.526
											Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tersedianya buku laporan pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	20.314.282	20.314.282
											Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019	1 buku (65 eksemplar)	1 buku (65 eksemplar)	77.744.830	68.715.161
											Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Sesuai PP No. 39 Tahun 2006	Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	4 triwulan	4 triwulan	14.298.400	14.198.866
											Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang harmonis dan sinkron	1 Dokumen	1 Dokumen	170.646.701	170.634.991

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
											Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	8 Kali	8 Kali	126.562.528	125.426.508
											Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan Akselarasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan yang sinkron	1 dokumen	1 dokumen	25.801.721	25.288.161
											Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Dokumen Perencanaan Akselarasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha yang sinkron	1 dokumen	1 dokumen	14.629.450	14.580.938
											Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	128.535.600	127.188.203
											Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 laporan	1 laporan	15.350.956	15.346.995
											Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron	2 Dokumen	2 Dokumen	142.712.450	141.770.945
											Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	41.183.200	36.507.790

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
											Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Dukungan perkuatan kelembagaan sumber daya air (Komisi Irigasi, Dewan Sumber Air, TKPSDA, dll) dan Program Integrated Developmentand Management of irrigation Project (IPDMIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	13.334.400	13.004.555
											Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	- Rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan. - KUA PPAS Lingkup Bidang Sosial dan Budaya. - Rancangan akhir Renja SKPD 2021. - Rancangan Renja Perubahan SKPD 2020. - Rapat koordinasi Terkait Penyusunan Perencanaan dan penganggaran lingkup Bidang sosial dan Budaya.	4 dokumen dan 6 kali rapat koordinasi	4 dokumen dan 6 kali rapat koordinasi	512.508.200	503.263.238
											Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	Sasaran pembangunan sub bidang social budaya yang tercapai	1 laporan	1 laporan	54.635.950	54.301.706
											Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sasaran pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang tercapai	1 laporan	1 laporan	54.090.368	53.418.413
											Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Sasaran pembangunan Sub Bidang Sumberdaya manusia yang tercapai	1 dokumen	1 dokumen	40.556.500	40.480.141
											Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Pelaksanaan rakor AMPL Kab/kota	2 kali	2 kali	45.772.000	45.513.750

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
											Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Tersusunnya laporan koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	51.013.926	48.603.264
											Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pangan dan gizi, sosialisasi RAD pangan gizi	4 kabupaten	4 kabupaten	43.631.451	41.311.985
											Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Jumlah Renja yang dievaluasi - Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yang difasilitasi -Jumlah RPJMD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	50 renja 19 kab/kota 2 kab/kota	50 renja 19 kab/kota 2 kab/kota	341.428.756	355.877.198
											Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat	- GAP/GBS OPD Provinsi yang diverifikasi. - Rakor Pelaksanaan RAD PUG	1 dokumen GAP/GBS. 3 kali rakor	1 dokumen GAP/GBS. 3 kali rakor	232.188.294	231.293.688
											Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	Mengikuti pelaksanaan Rakortek Tingkat Pusat	1 dokumen	1 dokumen	76.206.805	76.146.433
											Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	1.944.261	1.944.261
											Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	1 dokumen	1 dokumen	172.943.257	101.497.467
											Tata Kelola Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah	Terkoordinasinya Perencanaan dan implementasi program PHJD	1 kali	1 kali	363.048.900	354.036.201

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tw I	-	-		- Telah dibentuk TIM SAKIP. - Peningkatan pemahaman SAKIP dan RB pada ASN internal Bappeda melalui sosialisasi. - Indikator Kinerja Individu telah dibuat dan disesuaikan dengan PK dan SKP. - Pimpinan sudah memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi terhadap IKU, PK, RKT, Rencana Aksi.	Penilaian kinerja belum disertai dengan pemberian reward dan punishment	1) Dibuat aturan internal tentang pemberian reward dan punishment terhadap penilaian kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**3.027.134.125**	**2.976.925.768,80**
			Tw II	BB	BB 72,51	100%	- Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja.		2) Identifikasi Perumusan Cascading struktur baru		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Benda Pos materai 6000 dan 3000, pengiriman surat dan Honor Pegawai PTT	12 Bulan	12 Bulan	39.980.000	39.980.000
			Tw III	BB	BB 72,51	100%			3) Optimalisasi Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi. 4) Akan dilaksanakan konsinyir penyusunan cascading dan indikator kinerja Bappeda pada Bulan November 2020.		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	12 bulan	919.000.000	893.081.646
			Tw IV	BB	BB 72,51	100%					Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan kantor, tersedianya jasa sopir kantor, Tersedianya jasa petugas dan peralatan keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	902.370.000	883.791.766,80
											Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor	13 unit	13 unit	69.295.000	69.011.327
											Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	48.681.583	48.669.796
											Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	35.951.284	35.891.034
											Penyediaan komponen instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	12 bulan,	12 bulan,	5.930.545	5.924.145

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
											Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku-buku	6 jenis Koran, 2 majalah dan buku	6 jenis Koran, 2 majalah dan buku	32.040.000	32.004.000
											Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	12 bulan	12 bulan	820.140.753	815.498.694
											Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental	Terlaksananya wirid dan Terlaksananya kegiatan senam	12 bulan	12 bulan	103.744.960	103.121.360
											Penyediaan makanan dan minuman	rapat/pertemuan yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	49.952.000
										Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**636.951.314**	**634.512.689**
											Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	112.563.750	112.534.323
											Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	180.000.000	179.905.580
											Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional	13 unit	13 unit	83.102.364	81.474.886
											Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	Telaksananya pemeliharaan AC, Tabung Pemadam kebakaran dan mesin pompa air beserta suku cadang	12 bulan	12 bulan	32.500.000	32.415.000
											Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor yang diperbaiki	1 unit	1 unit	19.885.200	19.769.000
											Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Perbaikan Sound System, Telepon, Faximile, CCTV dan jaringan, Kamera dan Projector	12 bulan	12 bulan	13.000.000	12.995.400

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
											Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer, UPS, Scan dan Jaringan Komputer	12 bulan	12 bulan	30.000.000	29.918.500
											Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya komputer, laptop dan printer	10 unit	3 unit, 4 unit, 3 unit	165.900.000	165.500.000
										Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**67.500.000**	**67.498.200**
											Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas	90 Stel	90 Stel	67.500.000	67.498.200
										Program Peningkatan Kapasiatas Sumberdaya Aparatur					**1.220.000**	**1.125.000**
											Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	2 orang	1.220.000	1.125.000
										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					**401.063.083**	**395.122.507**
											Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ Bappeda)	3 Dokumen	3 Dokumen	65.444.050	62.910.577
											Penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah PA; KPA; PPK; PPTK; dan pengelola keuangan lainnya	12 bulan	12 bulan	254.000.000	252.050.000
											Pengelolaan pengawasan dan pengendalian asset SKPD	Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD	12 bulan	12 bulan	42.960.000	42.960.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
											Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, DPA dan DPPA	3 Dokumen	3 Dokumen	38.659.033	37.201.930

Padang, Januari 2021
Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

Hansastri,SE,Ak,MM,CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001